TABLOID Sinar Tani

TERBIT SETIAP HARI RABU
Harga Tabloid Cetak : Rp 16.000
E-paper : Rp 72.000/Tahun (48 edisi)
www.tabloidsinartani.com

Hotline/SMS : 081317575066
e-mail : redaksi@sinartani.co.id
www.sinartani.co.id

Edisi 8 - 14 Oktober 2025
No. 4105
Tahun LVI



9 Tingkatkan Pengawasan, BGN Komitmen Jaga Kualitas Pangan

10 Euis Sartika, Menjaga Warisan Minuman Lahang

14 Pemanis Alternatif, Stevia Lebih Aman bagi Kesehatan



www.tabloidsinartani.com tabloidsinartani.com @SinarTaniST tabloidsinartani SINTA TV



EDITORIAL

Musim Tanam dan Serapan Pupuk Subsidi

Bagi petani musim tanam padi telah tiba kembali. Meski sepanjang tahun ini, hujan terus mengguyur hampir seluruh sentra padi di Indonesia, tapi bagi petani bulan Oktober menjadi waktu yang terbilang paling pas untuk kembali turun ke sawah untuk menggarap lahan.

Berbagai persiapan dilakukan petani, dari mulai menggarap lahan dan sarana produksi, baik benih dan pupuk hingga antisipasi serangan hama penyakit. Salah satu yang selama ini menjadi keluhan petani adalah pupuk subsidi.

Bagi petani, pupuk menjadi sarana produksi vital yang tak bisa terpisahkan dari kegiatan usaha tani. Keluhan yang paling sering petani lontarkan adalah ketersediaan pupuk tepat waktu, dan harga pupuk subsidi yang berada di atas HET (Harga Eceran Tertinggi).

Jika melihat perjalanan regulasi dalam tata kelola pupuk, maka pemerintah telah berkali-kali melakukan perubahan aturan main. Dari mulai sistem terbuka, kemudian direvisi menjadi sistem tertutup. Lalu pemerintah memberlakukan Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi dengan data RDKK yang selanjutnya menjadi e-RDKK.

Beleid terbaru tata kelola pupuk subsidi adalah dengan terbitnya Perpres No. 06 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Subsidi yang kemudian ditindaklanjuti Permentan No. 15 Tahun 2025. Ada beberapa hal yang mengalami perubahan mendasar dalam tata kelola pupuk subsidi.

Misalnya, prinsip distribusi pupuk yang sebelumnya 6T yakni, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, tepat harga, tepat jenis, tepat mutu, kini menjadi 7T dengan penambahan tepat penerima. Penerima pupuk juga bertambah. Jika sebelumnya hanya petani dan LMDH (Lembaga Masyarakat Dekat Hutan) yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan), kini ditambah pembudidaya ikan yang tergabung dalam Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan).

Paling penting lagi mekanisme pendistribusian pupuk subsidi. Jika sebelumnya harus melalui berbagai lini yakni Lini 1 (produsen), Lini 2 (Distributor), Lini 3 (Agen) dan Lini 4 (kios/pengecer). Kini pemerintah memangkas dari produsen langsung melalui Pelaku Usaha Distribusi (PUD) ke titik serah yakni gabungan kelompok tani (gapoktan) dan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih menjadi titik serah.

Meski tahun ini pemerintah menjamin ketersediaan pupuk dan membuat sistem distribusi lebih singkat agar petani mudah mendapatkan pupuk subsidi, ternyata penyerapan pupuk subsidi masih rendah. Catatan Pupuk Indonesia, sampai Agustus masih terdapat 6,89 juta dari 14,91 juta petani atau 46,2% yang terdaftar di e-RDKK belum menebus pupuk subsidi. Bahkan pada tahun 2024 terdapat 2,98 juta dari 14,67 juta petani atau 20% petani yang terdaftar e-RDKK belum menebus pupuk subsidi.

Sedangkan data realisasi penyaluran pupuk bersubsidi hingga 28 September 2025 baru mencapai 62,2% dari alokasi kontrak dan 58,8% dari alokasi Keputusan Menteri Pertanian terhadap realokasi menjadi sebesar 9,55 juta ton. Sedangkan stok hingga 28 September 2025 untuk urea sebanyak 925 ribu ton, ZA 49 ribu , NPK 649 ribu ton dan Organik 56 ribu ton.

Pertanyaannya, mengapa serapan pupuk subsidi masih cukup rendah? Apakah perubahan pola distribusi pupuk subsidi menjadi penyebabnya atau faktor lain. Kementerian Koordinator Bidang Pangan melalui Kepmenko Pangan No. 6 Tahun 2025 membentuk kelompok kerja (pokja) untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi. Kita tunggu kerja tim Pokja Pupuk Subsidi, apa sebenarnya yang terjadi.



SAUNG TANI

Pengurus HKTI dilantik
- Selamat bekerja

Banyak petani belum tebus pupuk subsidi
- Ada apa ini?

Ada kasus keracunan MBG
- Mau sehat, malah sakit!

MENTAN MENYAPA



Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian RI

Generasi Muda, Siapkan Diri Transformasikan Pertanian

Bagi dunia pertaninan, peran generasi muda, khususnya mahasiswa, sebagai motor penggerak dalam membangun pertanian Indonesia menuju kemandirian pangan dan kekuatan ekonomi dunia menjadi sangat penting. Apalagi kebangkitan bangsa harus dimulai dari sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ketahanan nasional.

Kalau pertanian bergerak, maka semua sektor ikut bergerak, transportasi, industri, teknologi, bahkan sosial dan budaya. Karena itu, generasi muda harus menyiapkan diri untuk menjadi bagian dari transformasi besar pertanian Indonesia.

Saat ini Indonesia telah mencatat sejarah dengan produksi beras tertinggi sepanjang masa dan bahkan mampu mengekspor bantuan pangan, termasuk 10 ribu ton beras ke Palestina. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga hadir membantu bangsa lain yang membutuhkan.

Dunia mengakui capaian kita. Bahkan FAO menempatkan pertumbuhan pertanian Indonesia sebagai yang tertinggi kedua di dunia. Tapi tugas kita belum selesai. Generasi muda harus hadir sebagai agen perubahan, membangun pertanian dengan ilmu, kreativitas, dan teknologi.

Pada kesempatan ini, kami mengajak generasi muda untuk berani mengambil bagian dalam penerapan *smart agriculture*, *precision farming*, dan hilirisasi komoditas. Ia mencontohkan penggunaan drone, *internet of things* (IoT), hingga sistem irigasi presisi yang mampu menghemat 80 persen air dan meningkatkan produksi hingga dua kali lipat.

Setelah mencetak capaian bersejarah dengan stok beras nasional tertinggi sepanjang masa, mencapai 4,2 juta ton, Indonesia siap naik kelas, dari penghasil bahan mentah menjadi negara pengolah sekaligus eksportir produk pertanian bernilai tambah tinggi.

Program hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekspor, tetapi juga menciptakan jutaan lapangan kerja baru, menghidupkan industri desa, dan memperkuat ekonomi lokal. Selama ini, negara lain mengolah kakao dan kopi kita lalu mengekspor dengan nilai puluhan kali lipat. Kini saatnya Indonesia memimpin hilirisasi komoditasnya sendiri.

Untuk membantu generasi muda dalam hilirisasi pertanian, pemerintah menyiapkan investasi senilai Rp371,6 triliun yang bersumber dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), sektor swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pemerintah saat ini mempercepat hilirisasi komoditas strategis perkebunan dengan fokus pada enam komoditas utama, yakni tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, serta lada/pala. Program ini menargetkan pengembangan lahan seluas 800.000 hektar dengan dukungan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kementerian Pertanian sebesar Rp9,95 triliun.

Dengan sinergi pemerintah, dunia usaha, dan pemuda, hilirisasi diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat kedaulatan pangan sekaligus meningkatkan daya saing pertanian Indonesia di pasar global.

Pertanian masa depan ada di tangan kalian, generasi muda. Jangan berhenti hanya pada teori, tapi berani berproses, berani salah, dan terus berinovasi. Indonesia membutuhkan SDM yang tangguh, bukan sekadar pencari ijazah. Kalian harus lahir sebagai pejuang pangan, penggerak industrialisasi, dan pembela petani.**

PINDAI BARCODE!
Untuk Mengakses e-paper Sinartani.



Desain Cover: Budi Putra K.
Foto Cover: Freepik.com (diolah)

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Dr. Ir. Memed Gunawan; **Pemimpin Perusahaan :** Ir. Mulyono Machmur, MS; **Pemimpin Redaksi :** Yulianto; **Redaktur Pelaksana :** Yulianto; **Redaktur :** Gesha Yuliani, S.Pi; **Staff Redaksi :** Julian Ahmad; Nattasya; Indri Hapsari, S. Sos; Echa; Herman Rafi; **Koresponden :** Wasis (Cilacap), Soleman (Jatim), Suriady (Sulsel), Abdul Azis (Aceh), Suroyo (Banten), Gultom (Sumut), Nsd (Papua Barat); **Layoutman :** Suhendra, Budi Putra Kharisma; **Korektor/Setter**: Asrori, Hamdani; **Sekretariat Redaksi:** Hamdani; **Pengembangan Bisnis :** Dewi Ratnawati; Indri; Echa Sinaga; **Keuangan:** Katijo, SE (Manajer); Ahmad Asrori; **Sekretariat Perusahaan** : Suparjan; Jamhari; Awan; **Distribusi:** Saptyan Edi Kurniawan, S.AP; Dani; Jamhari
Penerbit: PT. Duta Karya Swasta; Komisaris Utama: DR. Ir. A. H. Rahadian, M.Si; **Komisaris:** Ir. Achmad Saubari Prasodjo
Direktur Utama: DR. Ir. Memed Gunawan; **Direktur:** Ir. Mulyono Machmur, MS
Alamat Redaksi dan Pemasaran/Iklan: Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta 12550, Telp. (021) 7812162-63, 7817544 Fax: (021) 7818205
Email: redaksi@sinartani.co.id; **Izin Terbit** No. 208/SK/Menpen/SIUPP/B.2/1986; Anggota SPS No. 58/1970/11B/2002; **Izin Cetak:** Laksus Pangkopkamtibda Jaya No. Kep. 023/PK/IC/7; **Harga:** Rp. 16.000 per edisi; **Tarif Iklan: FC** Rp. 8000/mmk, **BW** Rp. 7.000/mmk; **Pembayaran:** Bank Mandiri Cab. Ragunan No. No rekening 1270096016587; Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413, BNI'46 Cab. Dukuh Bawah Jakarta No. 14471522, Bank Agro Kantor Pusat No. 01.00457.503.1.9 a/n Surat Kabar Sinar Tani. Bank BRI Cabang Pasar Minggu: a/n PT. Duta Karya Swasta No. 0339.01.000419.30.1; **ISSN:** 0852-8586;
Percetakan: PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika

Penyuluh di Garis Depan Swasembada Pangan

Penyuluh pertanian bukan hanya pendamping, tapi penjaga pangan, memastikan setiap ladang produktif dan setiap keluarga tak kekurangan makanan.



UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Jombang

Di tengah hamparan sawah, ladang jagung, dan kebun kedelai, ada sosok yang sering tak terlihat, tapi perannya sangat vital, penyuluh pertanian.

Mereka bukan sekadar pendamping petani, tapi ujung tombak pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Tanpa mereka, program swasembada pangan bisa berjalan setengah hati, dan petani kerap bingung harus mulai dari mana.

Bayangkan seorang petani ingin menanam padi baru. Ia punya tanah, air, dan tenaga, tapi bingung soal benih yang tepat, pupuk yang cocok atau cara menghadapi hama yang datang mendadak. Di sinilah penyuluh hadir, bagaikan pemandu yang mengantarkan petani dari ketidakpastian menuju panen yang menjanjikan.

Salah satu penyuluh di Kabupaten Bogor bercerita. “Saya setiap hari keliling desa, memastikan petani menanam varietas unggul seperti Inpari 32 HDB yang tahan hama dan cepat panen. Saya juga ajari mereka cara memupuk sesuai kondisi tanah, agar pupuk tidak mubazir.”

Dengan arahan teknis seperti ini, hasil panen bisa meningkat hingga 20–30% dibanding sebelumnya. Selain itu, penyuluh juga membantu petani mengatur jadwal tanam.

Tanaman pangan seperti padi dan jagung memiliki fase kritis yang sensitif terhadap air dan pupuk. Penyuluh mengajari petani kapan menanam, menyiram, dan memupuk agar fase vegetatif dan generatif berjalan optimal.

Misalnya, pemupukan padi dilakukan dua kali utama yakni pertama saat tanaman berumur 14–21 hari dengan pupuk nitrogen fosfor, dan kedua saat tanaman mulai berbunga untuk meningkatkan produktivitas bulir

Peran penyuluh kini tidak hanya manual. Mereka juga memperkenalkan teknologi sederhana tapi efektif. Contohnya, penggunaan kalender tanam digital untuk memprediksi hujan dan waktu tanam terbaik. Ada juga aplikasi pemantau tanah yang membantu petani mengetahui kadar air, pH, dan kebutuhan nutrisi tanaman secara cepat. Dengan alat ini, petani bisa menyesuaikan dosis pupuk atau irigasi sesuai kondisi lahan.

Dalam hal hama, penyuluh mengajarkan metode pengendalian hayati. Misalnya, untuk hama wereng pada padi, mereka mendorong penggunaan predator alami seperti kumbang atau perangkap feromon, dibanding langsung menyemprot pestisida kimia. Teknik ini lebih aman bagi lingkungan dan kesehatan petani, sekaligus menekan biaya produksi.

Edukasi dan Pendampingan

Peran penyuluh tidak berhenti di lapangan. Mereka juga menjadi guru bagi petani, menjelaskan pentingnya penggunaan benih unggul, dosis pupuk yang tepat, dan pengelolaan hama. Penyuluh mengadakan workshop singkat di desa, mengundang petani untuk belajar secara langsung.

Selain itu, mereka mendorong petani muda untuk ikut terlibat, memperkenalkan konsep pertanian modern dan agroindustri skala kecil. Dengan bimbingan penyuluh, generasi muda bisa memanfaatkan lahan secara lebih produktif dan inovatif, sekaligus menjaga ketahanan pangan keluarga dan desa.

Program Pemerintah

Penyuluh bukan hanya mendampingi petani satu per satu. Mereka juga menjadi jembatan penting antara petani dan pemerintah. Semua program pemerintah mulai dari distribusi pupuk bersubsidi, benih unggul, hingga pelatihan pertanian digerakkan lewat penyuluh.

Ketika pemerintah meluncurkan program Swasembada Pangan Nasional, penyuluh turun ke desa-desa, memetakan lahan, memantau kebutuhan pupuk, dan mencatat potensi hasil panen.

Data ini menjadi rujukan pemerintah dalam mengambil keputusan, misalnya menambah pasokan pupuk, memperluas pelatihan, atau mengatur distribusi pangan ke wilayah yang rawan kekurangan.

Contoh lain, saat ada varietas jagung unggul baru seperti Bisi 816 penyuluh membantu petani menanamnya di lahan percontohan. Mereka mengawasi mulai dari penyemaian biji, penanaman bibit berjarak 20–25 cm, hingga pemupukan 3–4 kali selama masa pertumbuhan. Dengan cara ini, petani bisa melihat langsung hasil varietas baru sebelum menanam di lahan luas.

Perubahan iklim membuat tugas penyuluh semakin berat. Hujan yang tidak menentu atau panas berkepanjangan bisa merusak fase kritis tanaman. Penyuluh memberikan solusi praktis, seperti irigasi tetes untuk jagung dan padi, atau pemilihan varietas tahan kering, lahan yang rawan kekeringan.

Selain itu, mereka mengajarkan teknik rotasi tanaman. Misalnya, setelah panen padi, lahan bisa ditanami kacang tanah atau kedelai untuk memperbaiki kesuburan tanah dan mengurangi serangan hama yang spesifik pada satu jenis tanaman. Metode ini terbukti meningkatkan produktivitas jangka panjang dan menjaga keseimbangan ekosistem lahan pertanian.

Hasil dari kerja keras penyuluh terlihat jelas. Di beberapa desa di Jawa Barat, panen padi meningkat hingga 1–1,5 ton per hektar dibanding sebelumnya. Petani jagung mampu menanam dua kali dalam setahun dengan hasil lebih stabil. Semua ini berkat arahan penyuluh, mulai dari penyiapan bibit, penyemaian, pemupukan, hingga panen dan pengelolaan pascapanen.

Mengamankan Masa Depan Pangan

Ketika kita membeli nasi di warung, melihat jagung di pasar, atau menikmati olahan kedelai, jarang terpikir bahwa ada orang-orang yang berjasa menjaga stok pangan tetap aman. Penyuluh adalah garda terdepan, bekerja di bawah terik matahari dan hujan deras, menghubungkan ilmu pengetahuan dengan praktik di lapangan.

Tanpa mereka, program pemerintah bisa berjalan tapi tak tepat sasaran. Panen bisa gagal, dan distribusi pangan terganggu. Dengan penyuluh yang berdedikasi, swasembada pangan bukan hanya jargon, tapi kenyataan yang dirasakan petani dan masyarakat.

Maka, setiap butir beras, jagung, dan kacang yang sampai ke meja makan kita adalah buah kerja keras penyuluh pertanian yang berdiri di garis depan, menjaga ketahanan pangan bangsa.

Mereka mengingatkan kita bahwa pertanian bukan sekadar kerja keras di ladang, tapi juga kerja cerdas dan penuh strategi, di mana setiap keputusan teknis kecil bisa berbuah besar bagi masa depan pangan Indonesia.

Penulis : Siti Nurjanah
Penyuluh Pertanian Pusat
Kementerian Pertanian

Pendekatan Bolero dalam Pemuliaan Kopi dan Kakao

CATATAN Begawan



Tim peneliti BOLERO menyatukan para pakar dari Eropa, lembaga penelitian nasional di tiga negara penghasil kopi dan kakao (Nikaragua, Uganda, Vietnam), dan mitra industri. Tim ini berfokus pada pemuliaan tanaman kopi dan kakao yang memiliki ketahanan lebih baik dan mengurangi kebutuhan input eksternal seperti pupuk.

Para peneliti berfokus pada teknik yang disebut pencangkokan yakni menyambungkan bagian atas tanaman kopi atau kakao ke akar atau batang akar yang lebih kuat. Kadang, seringkali dari varietas kopi liar atau robusta, yang sudah menunjukkan lebih tahan perubahan iklim.

Mengapa harus mencangkok? Karena pemuliaan tanaman tradisional terlalu lambat. Sebab, menciptakan varietas baru melalui penyerbukan silang dan pertumbuhan bertahun-tahun bisa memakan waktu 20-30 tahun, jauh lebih lambat daripada laju perubahan iklim.

Peneliti mengambil varietas yang sudah dikembangkan, diuji, dan disetujui, lalu mencangkoknya pada batang bawah yang beradaptasi, misalnya kekeringan. Ini cara yang jauh lebih cepat untuk mengatasi perubahan iklim.

Bagi para petani berarti mempertahankan biji kopi yang mereka kenal sambil mendapatkan tanaman yang lebih kuat, bahkan hanya dalam beberapa tahun, bukan puluhan tahun.

Dengan tanaman cangkok, petani bisa mempertahankan varietas favoritnya, tetapi juga membuatnya lebih cepat beradaptasi dengan perubahan iklim. Tanaman dengan akar yang tahan kekeringan akan bertahan lebih lama dan berdampak lebih kecil pada produksi.

Para ahli juga merintis terobosan baru dengan mempelajari sistem akar secara rinci dan membangun model komputer untuk memprediksi pasangan tanaman-akar terbaik. Beberapa tanaman hasil okulasi bisa siap ditanam petani dalam waktu lima tahun.

Uji rasa dengan perusahaan seperti Nestlé, Illy, dan Lavazza menunjukkan bahwa tanaman ini memberikan rasa dan aroma yang sama dengan yang diharapkan para penikmat kopi. Para peneliti juga memeriksa kualitas kopi, termasuk rasa dan aromanya.

Sumber : Horizon Science Magazine

SAMBUT MUSIM TANAM



Petani saat ini menyambut musim tanam Oktober-Maret 2025/2026. Salah satu yang menjadi kebutuhan pokok dalam usaha tani adalah sarana produksi, khususnya pupuk. Sejauh mana kesiapan sarana penyubur tanaman tersebut?

Pupuk memang menjadi sarana produksi pertanian yang sangat vital bagi petani, selain benih. Namun saat musim tanam tiba, kerap petani mengeluhkan ketersediaan bahan penyubur tanaman tersebut. Sebagai barang subsidi, harga pupuk subsidi juga sering berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang pemerintah tetapkan.

Untuk mengatasi persoalan pupuk yang menjadi keluhan petani, pemerintah sejak awal tahun 2025 memperkuat tata kelola distribusi pupuk dengan menerbitkan Perpres No. 06 Tahun 2025, kemudian ditindaklanjuti Permentan No. 15 Tahun 2025.

Dalam penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah mengedepankan prinsip 7T yakni, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, tepat harga, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat penerima. Untuk mempermudah petani mendapatkan pupuk subsidi, pemerintah membuka kesempatan gabungan kelompok tani (gapoktan) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi titik serah.

Namun di lapangan petani dan penyuluh masih mengeluhkan ketersediaan pupuk. Saat webinar Ketersediaan Sarana Produksi pada Musim Tanam Oktober-Maret yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bersama PT. Pupuk Indonesia di Jakarta, Selasa (30/9), Yusuf Randanan, Penyuluh Pertanian Kutai Timur mengakui, masih banyak kendala petani mendapatkan pupuk bersubsidi.

Mislanya, ketika penyuluh memberikan pendampingan dalam menginput data petani di e-RDKK untuk alokasi pupuk subsidi ternyata portalnya tidak bisa dibuka. Selain itu, saat petani akan menebus pupuk subsidi di distributor, kuota untuk petani tidak ada. Bahkan ada distributor menolak petani yang menggunakan kartu tani untuk menebus pupuk subsidi. Akhirnya petani membeli pupuk non subsidi. “Pemerintah dan Pupuk Indonesia harus mengevaluasi dan audit distributor,” tegasnya.

Keluhan juga datang dari Sudarwanto, PPL Blora mengatakan, persentase jenis pupuk yang tersedia kadang tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Misalnya, petani di Blora saat ini banyak membutuhkan pupuk ZA dan NPK, tapi ketersediaannya kurang. Sedangkan stok pupuk urea dan organik justru berlebih.

Ia pun berharap pemerintah menambah alokasi pupuk ZA dan NPK dan mengurangi pupuk urea dan organik untuk wilayah Blora. “Kalau petani kebanyakan menggunakan urea juga tidak bagus, karena tanaman padi mudah rubuh. Pupuk organik juga petani jarang yang menebus. Jadi lebih baik alokasinya ditambahkan ke ZA atau NPK,” tuturnya.

Stok Pupuk Berlimpah

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Alokasi Pupuk Bersubsidi, Direktorat Pupuk Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Yustina Retno Widiati mengatakan, pemerintah memastikan stok pupuk subsidi cukup aman dalam menyambut musim tanam Oktober-Maret. Karena itu, ia meminta petani yang tercatat dalam e-RDKK bisa segera menebus pupuk bersubsidi. “Hingga kini masih banyak petani yang belum menebus pupuk subsidi,” katanya.

Data Ditjen PSP, jumlah petani yang sudah tercatat di e-RDKK 2025 dan telah disahkan Kepala Dinas daerah sebanyak 14.969.691 NIK. Namun sampai 26 September 2025 petani yang sudah melakukan penebusan pupuk baru sebanyak 8.816.429 NIK atau 58,90 persen.

Sedangkan jika dilihat dari alokasi jumlah pupuk subsidi yang pemerintah sediakan untuk tahun 2025 sesuai e RDKK sebanyak 9,55 juta ton. Sedangkan realisasi penyerapan pupuk subsidi baru 5,59 juta ton atau 58,58 persen dari alokasi. Artinya, ketersediaan pupuk subsidi masih sebanyak 3,96 juta ton.

Jenis pupuk yang tersedia yakni urea, NPK (15-10-12), NPK Formula Khusus, Organik dan ZA. Dari beberapa jenis pupuk Yustina mengakui, penyerapan pupuk ZA termasuk paling rendah yakni hanya 0,94 persen atau 873 ton dari alokasi sebanyak 93.106 ton. ”Karena itu saat ini kami sedang melakukan pemutakiran data kembali untuk penemrima pupuk ZA,” katanya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian, Yustina mengungkapkan, petani yang dapat menerima pupuk subsidi adalah yang memiliki lahan maksimal 2 hektar. Petani tersebut juga wajib terdaftar dalam kelompok tani, termasuk petani Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). “Sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 15 Tahun 2025, petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi adalah yang tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam e-RDKK,” ujarnya.

Untuk mengatasi kendala distribusi pupuk, Yustina mengatakan, fungsi koordinasi dalam tata kelola pupuk bersubsidi menjadi sangat penting. Dari mulai usulan kebutuhan kelompok tani, input data petani di e RDKK oleh penyuluh, verifikasi usulan secara berjenjang melalui sistem eRDKK, kemudian validasi melalui pengesahan Kepala Dinas Pertaniam. “Data e RDKK itulah yang menjadi dasar penyaluran pupuk subsidi dari kios ke petani,” katanya.

Sementara itu, VP Manajemen Stakeholder PT. Pupuk Indonesia, Frans Adisuranta Ginting mengatakan, dengan lima anak perusahan yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, pihaknya siap mendukung stok pada musim tanam Oktober-Maret. Apalagi dengan dukungan jaringan penjualan yakni 1.055 distributor dan 27.189 pengecer. Saat ini PT Pupuk Indonesia telah menunjuk 1.030 PUD dan 26.459 PPTS yang tersebar di seluruh Indonesia.

Petani Belum Tebus Pupuk

Data PT. Pupuk Indonesia realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai 28 September 2025 mencapai 62,2 persen dari alokasi kontrak dan 58,8 persen dari alokasi sesuai Keputusan Menteri Pertanian. Data realisasi penebusan pupuk subsidi oleh petani baru sekitar 5.617.482 ton.

Pada tahun ini, Frans mengungkapkan, masih terdapat 6,89 juta atau 46,2 persen petani terdaftar e-RDKK belum melakukan penebusan. Sedangkan petani yang sudah menebus sebanyak 8,01 juta jiwa. Sementara jumlah petani yang tercatat di e-RDKK sebanyak 14,91 juta jiwa**.**

“Kondisi ini selaras dengan temuan Ombudsman RI atas data petani yang belum menebus. Karena itu, perlunya pemutakhiran data E-RDKK. Sesuai Permentan No. 15 Tahun 2025, pemerintah memutuskan e-RDKK dapat diperbaharui pada tahun berjalan,” katanya.

Jika dilihat dari realisasi penyaluran pupuk subsidi harian dari Januari-September, maka tahun 2025 sudah melebihi tahun 2024 dan 2023. Pada tahun 2025 sebanyak 5.617.482 ton, sedangkan tahun 2023 hanya 4.649.839 ton dan tahun 2024 sebanyak 5.027.422 ton**.**

“Kami mohon dukungan semua pihak karena realisasi penyaluran baru 58,8 persen terhadap alokasi sebanyak 9,55 juta ton, masih jauh dari target. Jadi secara alokasi stok pupuk masih berlebih, ada sekitar hampir 4 juta ton belum terserap dan cukup untuk mendukung musim tanam,” tuturnya. **Yul**

Aturan Baru, Penyaluran Pupuk Subsidi Lebih Transparan

PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY

Pemerintah telah mengubah pola penyaluran pupuk bersubsidi dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 6 Tahun 2025 yang kemudian diperjelas dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 15 Tahun 2025. Dengan aturan baru tersebut, pemerintah menyakini penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih transparan.

Bagi petani, pupuk menjadi bagian penting dalam usaha tani. Keluhan mengenai ketersediaan dan harga yang di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi rutinitas saat musim tanam tiba. Nah, mulai tahun ini pemerintah mengubah tata kelola pupuk bersubsidi. Salah satunya, pemerintah membuka peluang gabungan kelompok tani dan koperasi sebagai penyaluran pupuk bersubsidi atau titik serah.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Andi Nur Alam Syah mengatakan, tata kelola pupuk bersubsidi kini semakin transparan, berjenjang, dan berbasis sistem. Langkah ini ditempuh untuk memastikan penyaluran pupuk benar-benar tepat sasaran serta bermanfaat langsung bagi petani.

Menurutnya, alur tata kelola pupuk bersubsidi dimulai dari tahap perencanaan, yakni melalui pendataan petani penerima dan kebutuhan pupuk lewat e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Data tersebut kemudian diverifikasi dan divalidasi secara berjenjang, mulai dari penyuluh lapangan, koordinator penyuluh, kepala seksi, kepala bidang penyuluhan, hingga Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota. Seluruh mekanisme ini dijalankan melalui sistem yang terintegrasi.

"Tata kelola ini merupakan wujud kesungguhan pemerintah dalam memastikan pupuk bersubsidi sesuai prinsip 7 Tepat yakni Tepat Harga, Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Penerima, Tepat Tempat, dan Tepat Waktu," kata Andi Nur beberapa waktu lalu.

Pemerintah tegasnya, juga berkomitmen penuh memastikan pupuk bersubsidi diterima petani yang berhak. Melalui sistem e-RDKK dan verifikasi berjenjang, distribusi dapat berjalan tepat sasaran. Data petani yang terdaftar dalam e-RDKK juga telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) dan data kependudukan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, sehingga keabsahan data penerima dapat dipastikan berdasarkan NIK dan alamat.

Dengan tata kelola yang akuntabel dan stok yang memadai, Kementan berharap petani lebih tenang menghadapi musim tanam. Produktivitas pertanian pun diyakini akan terus tumbuh, memperkuat ketahanan pangan nasional. "Mekanisme berlapis ini menjadi bagian dari pengendalian dan validasi agar distribusi pupuk semakin akurat, transparan, dan tepat sasaran," kata Andi Nur.

Data e-RDKK

Pemerintah melalui Ditjen PSP juga menegaskan kebijakan baru yang diatur tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi tidak mengurangi hak petani, melainkan justru memperluas sasaran penerima agar lebih merata. "Petani tidak perlu khawatir, ketersediaan pupuk bersubsidi masih aman. Mereka tetap bisa menebus sesuai e-RDKK, sehingga proses usaha tani tidak akan terganggu," kata Ketua Tim Kerja Alokasi Pupuk Bersubsidi Ditjen PSP, Yustina Retno Widiati.

Berdasarkan aturan terbaru, pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani dan telah terdaftar di e-RDKK. Syarat luas lahan penerima tidak berubah, yakni maksimal 2 ha, termasuk yang tergabung dalam LMDH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Komoditas yang mendapatkan subsidi pun masih mencakup tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu, serta hortikultura meliputi cabai, bawang merah, dan bawang putih. Untuk sektor perkebunan, pupuk subsidi dialokasikan pada komoditas kopi, kakao, dan tebu rakyat.

Yustina juga mengungkapkan, jenis pupuk yang disediakan juga mengalami perluasan. Jika sebelumnya pupuk subsidi hanya mencakup Urea, NPK 15-10-12, NPK formula khusus, dan pupuk organik, maka pada aturan baru ditambahkan ZA khusus untuk tanaman tebu serta SP-36. "Penambahan jenis pupuk ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan spesifik di lapangan sehingga hasil pertanian maupun sektor baru yang mendapat alokasi dapat meningkat produktivitasnya," ujarnya.

Mekanisme penetapan alokasi pun lebih sederhana dibanding aturan sebelumnya. Jika dahulu harus melalui rakor Menko Perekonomian bersama Kementan serta menunggu SK gubernur dan bupati, kini cukup dilakukan melalui rakor Menko Pangan dan Kementan, kemudian ditetapkan dengan SK kepala dinas di provinsi maupun kabupaten/kota.

"Kami ingin mekanisme distribusi lebih cepat dan sederhana. Petani tidak perlu lagi menunggu proses yang berbelit, cukup dengan koordinasi antara pusat dan daerah, pupuk bisa segera sampai ke tangan mereka," tegas Yustina.

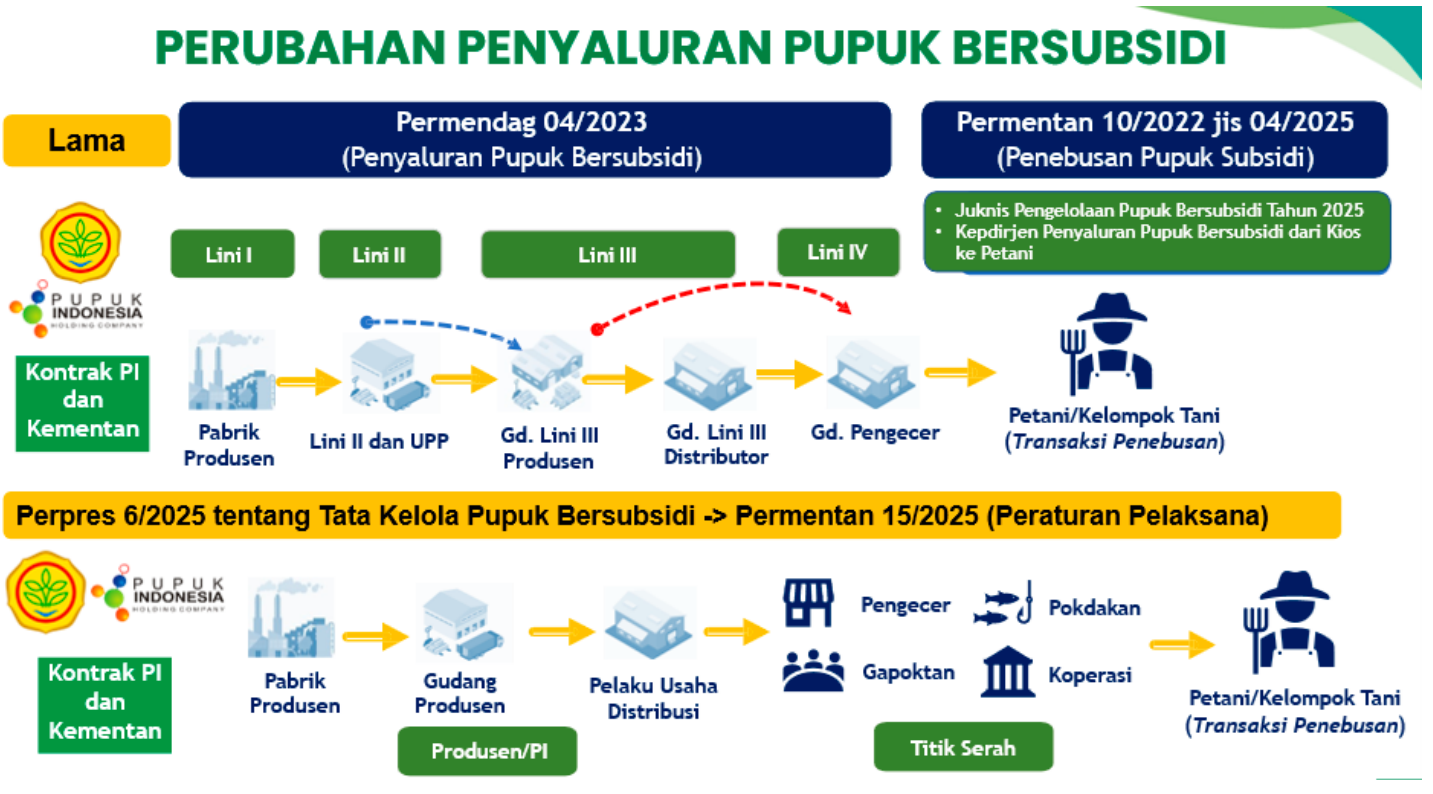
Alur penyaluran pupuk subsidi juga berubah. Sebelumnya distribusi dilakukan melalui BUMN pupuk, distributor, pengecer, baru sampai ke petani. Dalam aturan baru, peran distributor ditempatkan dalam koridor tanggung jawab BUMN pupuk, dan penyaluran diarahkan langsung ke titik serah yang terdiri atas pengecer, gabungan kelompok tani (gapoktan), kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), maupun koperasi. "Dari titik serah inilah petani dapat langsung menebus pupuk," ujarnya.

Proses bisnis pupuk subsidi tetap melewati beberapa tahap penting. Dimulai dari perencanaan melalui pembukaan pendaftaran e-RDKK, kemudian dilakukan penetapan alokasi di tingkat pusat oleh Kementan, di tingkat provinsi oleh kepala dinas, hingga tingkat kabupaten/kota. Tahap berikutnya adalah penyaluran yang dilaksanakan produsen pupuk hingga tiba di titik serah.

"Setelah itu dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim lapangan untuk memastikan bahwa pupuk benar-benar ditebus petani yang berhak. Jika hasil verifikasi sesuai, maka proses dilanjutkan dengan penagihan dan pembayaran pihak terkait," tuturnya.

Yustina menegaskan, koordinasi menjadi kunci keberhasilan dalam tata kelola pupuk bersubsidi. Koordinasi sangat penting agar pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan. "Semua pihak harus terlibat aktif mulai dari perencanaan hingga penyaluran, termasuk penyuluh, admin daerah, dan kelompok tani. Dengan begitu, hak petani yang telah terdaftar dalam e-RDKK dapat benar-benar terpenuhi," katanya.

Dengan aturan baru ini, pemerintah berharap distribusi pupuk bersubsidi menjadi lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran. Selain menjaga ketersediaan pupuk bagi petani, perluasan sektor penerima ke bidang perikanan juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional secara menyeluruh. **Herman/Yul**



Stok Pupuk Berlimpah, Petani Segera Tebus Pupuk

PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui jaringan produksi dan distribusi yang tersebar di seluruh pelosok negeri memastikan stok pupuk subsidi aman dan mencukupi kebutuhan petani. Untuk itu, petani bisa segera menebus pupuk subsidi yang sudah dialokasikan sesuai data e-RDKK.

Bagi Pupuk Indonesia, sebagai perusahaan plat merah yang bertugas menyediakan dan menyalurkan sarana produksi penyubur tanaman, telah menyiapkan stok pupuk cukup besar untuk menghadapi musim tanam 2025/2026. Kini tinggal bagaimana petani menyerap pupuk tersebut.

Sampai Agustus masih terdapat 6,89 juta dari 14,91 juta petani atau 46,2% yang terdaftar di e-RDKK belum menebus pupuk subsidi. Sementara pada tahun 2024 terdapat 2,98 juta dari 14,67 juta petani atau 20% petani yang terdaftar e-RDKK belum menebus pupuk subsidi. Karena itu, perlu pemutakhiran data pada E-RDKK. Sesuai Permentan No. 15 Tahun 2025, pemerintah akhirnya menetapkan e-RDKK dapat diperbaharui pada tahun berjalan.

Sementara realisasi penyaluran pupuk bersubsidi hingga 28 September 2025 baru mencapai 62,2% dari alokasi kontrak dan 58,8% dari alokasi Keputasan Menteri Pertanian terhadap realokasi menjadi sebesar 9,55 juta ton. Sedangkan stok hingga 28 September 2025 untuk urea sebanyak 925 ribu ton, ZA 49 ribu, NPK 649 ribu ton dan Organik 56 ribu ton.

"Hitungan kami dari stok yang ada, aman dan cukup baik secara nasional maupun di setiap provinsi," VP Manajemen Stakeholder Pupuk Indonesia, Frans Adisuranta Ginting saat webinar Kesiapan Sarana Produksi Pertanian Menyambut Musim Tanan Okmar yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bersama PT. Pupuk Indonesia di Jakarta, Selasa (30/9).

Untuk memastikan ketersediaan, Pupuk Indonesia melakukan monitoring harian stok pupuk sampai gudang penyangga kabupaten. Hingga kini stok pupuk di seluruh provinsi berada di atas batas aman atau *safety stock*. "Dengan skema baru tata kelola penyaluran pupuk subsidi, Pupuk Indonesia diwajibkan menyiapkan *minimum stock*," katanya.

Stok pupuk yang tersedia pun cukup menggembirakan. Tercatat 925 ribu ton urea subsidi masih tersedia, disusul 649 ribu ton NPK, 14 ribu ton NPK Kakao, serta ribuan ton pupuk jenis lain seperti ZA dan petroganik. Bahkan untuk beberapa jenis pupuk, stok yang ada jauh melebihi kebutuhan minimum yang ditetapkan, sehingga Pupuk Indonesia tidak hanya siap memenuhi permintaan pupuk subsidi, tetapi juga menyiapkan pupuk non-subsidi sebagai alternatif bila diperlukan.

Pupuk Indonesia mengandalkan lima pabrik besar untuk menyediakan pupuk yang beroperasi di Aceh, Palembang, Cikampek, Gresik, dan Bontang. Kelima pabrik ini memiliki kapasitas produksi mencapai 2,8 juta ton pupuk setiap tahun. Tidak hanya itu, perusahaan juga mengelola 509 unit gudang yang lokasinya dipilih strategis, dekat dengan pusat-pusat produksi pertanian agar distribusi bisa berjalan lebih efisien dan biaya logistik tetap terjaga.

Dukungan infrastruktur distribusi semakin kuat dengan keberadaan 129 jalur laut, 1.650 rute darat, serta fasilitas pelabuhan yang memungkinkan pengiriman pupuk ke seluruh pelosok Indonesia secara cepat dan terukur. Apalagi dengan dukungan jaringan penjualan yakni 1.055 distributor dan 27.189 pengecer. Sedangkan untuk pupuk subsidi, Pupuk Indonesia telah menunjuk 1.030 PUD dan 26.459 PPTS yang tersebar di seluruh Indonesia.

Perluas Titik Serah

Di sisi regulasi, mekanisme penyaluran pupuk subsidi kini mengikuti Perpres No. 6 Tahun 2025 dan Permentan No. 15 Tahun 2025. Aturan baru ini membawa perubahan penting, yakni memperluas tanggung jawab Pupuk Indonesia hingga ke titik serah. Jika sebelumnya hanya satu, maka kini menjadi empat yakni, pengecer, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi desa merah putih. "Perubahan skema ini bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran agar pupuk benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak," katanya.



Menurut Frans, proses distribusi dilakukan melalui dua jalur. Pertama, pupuk disalurkan dari gudang produsen ke Pelaku Usaha Distribusi (PUD) untuk kemudian diteruskan ke titik serah melalui mekanisme Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB). Kedua, penyaluran bisa langsung dari gudang produsen ke titik serah dengan mekanisme serupa.

"Apa pun skemanya, Pupuk Indonesia tetap bekerja sama dengan jaringan distribusi resmi yang menjadi bagian dari perusahaan agar pengawasan tetap ketat dan penyaluran sesuai ketentuan," ujarnya.

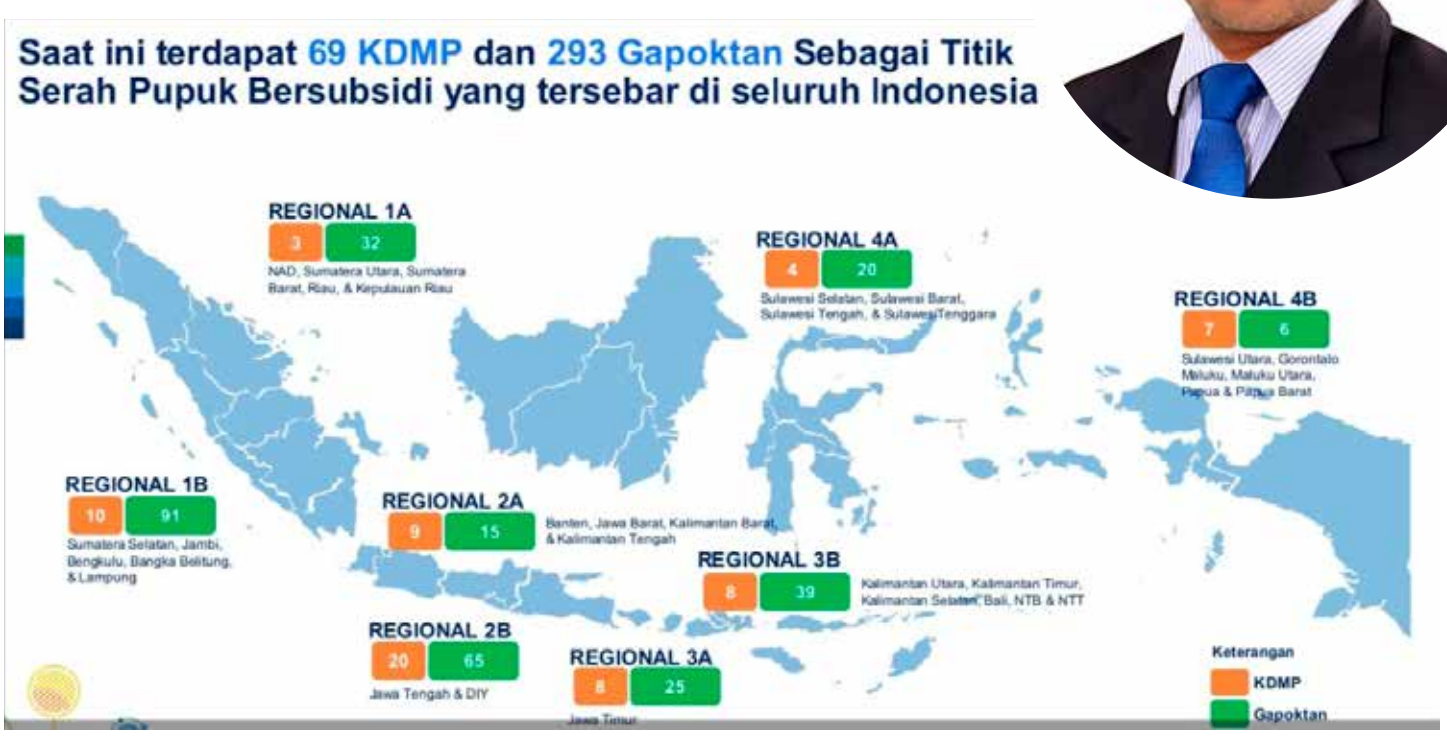
Sebagai bentuk transparansi, penyaluran pupuk subsidi hanya diberikan kepada petani yang telah terdaftar dalam sistem e-RDKK. Sistem ini memastikan bahwa pupuk hanya jatuh ke tangan petani yang memang berhak, yaitu mereka yang tergabung dalam kelompok tani, mengelola lahan maksimal dua hektar, dan menanam salah satu dari sepuluh komoditas utama yang ditetapkan pemerintah.

Bahkan Pupuk Indonesia melakukan pemantauan harian terhadap stok pupuk hingga ke tingkat gudang penyangga kabupaten. Pemantauan ini menjadi instrumen penting untuk memastikan tidak ada daerah yang kekurangan pupuk saat musim tanam berlangsung. "Jika realisasi penyaluran di suatu wilayah sudah mencapai 80 persen, kami mendorong segera dilakukan realokasi" ungkapnya.

Frans juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pupuk bersubsidi wajib dijual sesuai harga resmi agar tidak membebani petani. Ia meminta semua pihak di lapangan untuk segera melaporkan bila ada pelanggaran harga atau kios resmi yang tidak memasang stiker HET.

"Jika ada harga pupuk subsidi di atas HET, biasanya karena kios memasang tarif untuk biaya pengiriman sampai lokasi atau kadang penembusan bersama kelompok. Biasanya ada kas dalam kelompok," tuturnya.

Dengan kesiapan produksi, distribusi, serta sistem pengawasan yang semakin ketat, Pupuk Indonesia optimistis mampu mendukung penuh program swasembada pangan nasional. "Ketersediaan pupuk subsidi maupun non-subsidi sangat berlimpah. Petani tidak perlu khawatir. Kami siap mendukung pemerintah dan masyarakat tani agar musim tanam mendatang berjalan sukses," tegas Frans. **Herman/Yul**



Pemerintah Pastikan **Benih Padi Tersedia**



No	Agroekosistem	Keunggulan	Jumlah (Kg)		
			BS	BD	BP
1	Sawah irigasi	Potensi hasil	16.016	5.680	52.605
		Sangat genjah	2.482	532	4.162
		Beras khusus	2.664	5.054	13.008
		Tadah hujan	101	190	18
		Cekaman abiotik	830	190	3.391
2	Gogo/Ladang	Potensi hasil	513	799	834
		Amfibi	1.044	1.824	892
3	Rawa	Potensi hasil	1.081	1.446	3.136
		Beras khusus	207	525	1.184
		Total	**24.938**	**16.240**	**79.230**

Keterangan :
Data stok benih sumber yang tersedia di BRMP Padi per tanggal 18 Juli 2025

STOK **BENIH SUMBER PADI**

NO	AGROEKOSISTEM	STOK (Kg)		
		BS	BD	BP
1	Sawah Irigasi	22.093	11.646	73.184
2	Gogo / Ladang	1.557	2.623	1.726
3	Rawa	1.288	1.971	4.320
	Jumlah	24.938	16.240	79.230

Musim tanam Oktober–Maret tiba, pemerintah memastikan benih padi berkualitas siap didistribusikan ke petani. Ada sekitar 48 ribu ton benih padi untuk pertanaman seluas 1,92 juta hektar (ha). Dengan ketersediaan benih yang memadai, pemerintah optimistis musim tanam ke depan berjalan lancar.

PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY

Menyambut musim tanam, pemerintah memastikan ketersediaan benih padi berkualitas. Langkah ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan strategi jangka panjang menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mengamankan target swasembada beras.

Direktur Perbenihan Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan, Ladiyani Retno Widowati menegaskan, benih merupakan fondasi utama dalam usaha tani. Jika pupuk tersedia, airnya cukup, pengendalian hama maksimal, dan alat mesin pertanian memadai, tapi benihnya tidak ada atau mutunya rendah, maka seluruh upaya bisa sia-sia.

"Benih adalah kunci swasembada pangan," ujarnya saat webinar: Ketersediaan Sarana Produksi Menyambut Musim Tanam Okmar yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bersama PT. Pupuk Indonesia, Selasa (30/9).

Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan sendiri memiliki mandat strategis sesuai Permentan No. 2 Tahun 2025, yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan perbenihan untuk tiga komoditas utama, padi, jagung, dan kedelai. Dari ketiganya, padi menjadi prioritas utama mengingat perannya yang sangat besar dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia.

Berdasarkan data per 18 September 2025, stok benih sebar nasional mencapai 48.207 ton. Jumlah ini setara dengan kebutuhan untuk menanam sekitar 1,92 juta ha sawah, dengan asumsi kebutuhan benih tiap hektar sebanyak 25 kg.

Produksi benih ini berasal dari 3.854 produsen yang tersebar di seluruh Indonesia. Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan stok terbesar, mencapai lebih dari 23 ribu ton, selanjutnya di Jawa Barat sebanyak 6.000 ton dan Jawa Tengah sekitar 5.400 ton. Namun, Ladiyani mengakui, Papua dan Kalimantan Utara masih menjadi titik lemah dalam distribusi, sehingga perlu strategi distribusi lebih intensif.

Pemerintah kata Ladiyani, juga menyiapkan ragam varietas unggul baru (VUB), varietas lokal bersertifikat, hingga varietas khusus seperti Inpara untuk lahan rawa dan padi gogo untuk lahan tadah hujan. Varietas andalan seperti Cakra Buana Agritan, Inpari 32, Membramo, dan Siam Madu menjadi pilihan utama bagi petani di berbagai daerah.

Kehadiran varietas unggul ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, menjaga stabilitas hasil panen, sekaligus memperkuat ketahanan petani menghadapi risiko gagal panen akibat perubahan iklim maupun serangan hama penyakit.

Dengan ketersediaan benih yang memadai, pemerintah optimistis Musim Tanam Okmar 2025 berjalan lancar. Selain memastikan jumlah stok, penggunaan benih unggul bersertifikat diyakini akan memberi dampak signifikan terhadap hasil panen.

"Benih adalah fondasi pertanian. Kalau fondasinya kuat, rumah pertanian kita kokoh dan tahan badai. Pemerintah berkomitmen memastikan benih padi berkualitas tersedia tepat waktu, tepat varietas, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat lokasi," tegas Ladiyani.

Strategi Pemenuhan Kebutuhan Benih

Kementerian Pertanian menyiapkan sejumlah program strategis yang diproyeksikan seluas 2,67 juta ha. Total kebutuhan benih dari berbagai program prioritas tersebut diperkirakan mencapai 87.540 ton.

Kebutuhan tersebut untuk Program Optimalisasi Lahan (OPLA) yang targetnya 500 ribu ha, dengan kebutuhan benih 20 ribu ton, Program Cetak Sawah Baru pada areal 225 ribu ha membutuhkan sekitar 9 ribu ton benih. Kemudian mendukung diversifikasi sistem tanam, pengembangan padi gogo diarahkan pada lahan seluas 300 ribu ha yang kebutuhan benihnya mencapai 12 ribu ton.

Selanjutnya, program peningkatan produktivitas disiapkan pada 450 ribu ha yang diperkirakan membutuhkan benih sebanyak 11.250 ton. Kementerian Pertanian juga mendorong pengembangan biofortifikasi seluas 50 ribu ha dengan alokasi benih 1.250 ton. Sedangkan program pompanisasi tadah hujan ditargetkan untuk 500 ribu ha dengan kebutuhan benih 12.500 ton.

Karena itu, menurut Ladiyani, pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan produsen benih, penangkar, dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah memastikan distribusi benih unggul dapat berlangsung tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.

Bagaimana strategi pemerintah memastikan agar benih tersedia dengan tepat waktu dan jumlah? Ladiyani membeberkan, penyediaan benih secara in situ. Pemerintah mendorong setiap provinsi untuk mandiri menyediakan benih sesuai kebutuhan wilayahnya masing-masing.

Dengan begitu, tidak perlu lagi ada pergerakan benih dari Jawa menuju Sumatera atau Kalimantan. Pola ini diyakini akan mempercepat distribusi sekaligus menekan biaya logistik. "Kita ingin petani bisa mengakses benih tepat waktu, tanpa harus menunggu kiriman dari daerah lain. Prinsipnya, produksi dan pemanfaatan benih dilakukan sedekat mungkin dengan lahan yang akan ditanami," katanya.

Pemerintah juga meluncurkan Program Mandiri Benih untuk memperkuat penangkaran. Kelompok penangkar benih baru mendapatkan dukungan finansial sekitar Rp 68 juta per 10 hektar. Program ini ditujukan untuk memperluas areal penangkaran sekaligus menjamin kesinambungan produksi benih. "Kalau penangkar lokal kuat, petani tidak perlu khawatir soal pasokan benih. Ini juga membuka peluang ekonomi baru di pedesaan," jelas Ladiyani.

Pemerintah daerah juga diminta serius menyiapkan CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi) minimal enam bulan sebelum jadwal tanam. Dengan begitu, kebutuhan varietas dan volume benih bisa dihitung lebih tepat. "Kalau provinsi bisa mandiri, distribusi benih akan lebih cepat dan risiko kekurangan bisa ditekan. Petani tidak boleh menunggu benih datang ketika musim tanam sudah tiba," kata Ladiyani. **Gsh/Yul**

Penyuluh Siap Kawal Musim Tanam

Saat petani mulai menanam pada musim tanam Oktober-Maret 2025/2026, penyuluh pertanian hadir menjadi sahabat setia petani. Mereka mengawal petani dalam berbudidaya padi, bukan hanya soal ketersediaan sarana produksi seperti benih dan pupuk, tapi juga mengantisipasi serangan hama penyakit hingga panen tiba.

Musim tanam Oktober–Maret (Okmar) 2025/2026 segera dimulai. Semua mata publik kini menoleh ke sawah, apakah benih cukup? apakah pupuk tersedia? apakah lahan benar-benar siap ditanami? Namun, ada satu unsur krusial yang sering terabaikan: penyuluh pertanian.

Mereka adalah "kompas" yang membimbing petani agar tidak salah langkah dalam arus teknologi, regulasi, dan pasar yang kian cepat berubah. Hal ini disampaikan Dr. Acep Hariri, S.St, M.Si, Ketua Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pemberdayaan Petani, Pusat Penyuluhan Pertanian (BPPSDMP).

Menurutnya, swasembada pangan tidak cukup hanya mengandalkan bibit unggul dan pupuk subsidi. Ada faktor manusia yang justru paling menentukan yakni penyuluh yang mendampingi petani dari perencanaan, tanam, hingga panen.

"Meskipun aturan menyebutkan penginputan data IRDK dilakukan petani, kenyataannya literasi teknologi masih terbatas. Karena itu penyuluh hadir, mendampingi, memastikan data akurat, dan kebutuhan input pertanian sesuai dengan fakta di lapangan," ujar Acep saat webinar Ketersediaan Sarana Produksi pada Musim Tanam Oktober-Maret yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bersama PT. Pupuk Indonesia di Jakarta, Selasa (30/9),

Bagi pemerintah musim tanam Okmar punya bobot strategis. Sebab, produksi selama musim tanam tersebut akan menyumbang produksi terbesar pada tahun depan. Karena itu, bagi Acep, penyuluh menjadi garda depan di lapangan untuk mendorong petani dalam berbudidaya padi. Mereka bukan sekadar corong kebijakan, tapi problem solver yang memahami denyut nadi petani.

"Transformasi pertanian mencakup mekanisasi, penggunaan alsintan, pemetaan pupuk presisi, hingga drone pertanian. Penyuluh yang memastikan petani tidak mengeluarkan biaya berlebih untuk input yang tak perlu," katanya.

Dengan posisi penyuluh pertanian yang akan ditarik ke pusat mulai tahun 2026, penyuluh akan memainkan empat peran utama. Pertama, mereka hadir sebagai fasilitator yang membuka akses petani terhadap benih, pupuk, hingga pasar.

Kedua, penyuluh juga berperan sebagai formulator yang membantu merumuskan solusi dari masalah teknis maupun kelembagaan yang dihadapi petani.Ketiga, penyuluh menjadi inovator dengan memperkenalkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

Keempat yang tak kalah penting, penyuluh berperan sebagai komunikator yang menyampaikan kebijakan serta regulasi dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami petani.

"Penyuluh adalah orang terdekat dengan petani. Informasi dari mereka lebih cepat diterima, lebih dipercaya, dan lebih dipraktikkan. Itu sebabnya peningkatan kapasitas penyuluh jadi sangat penting," kata Acep.

Pendampingan

BPPSDMP sendiri menyiapkan peta jalan pendampingan selama musim tanam Okmar. Menurut Acep, pendekatan yang digunakan tidak hanya teknis, melainkan juga kelembagaan seperti kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan).

Kelembagaan petani tersebut diarahkan agar tidak berhenti di tahap belajar bersama, melainkan naik kelas menjadi motor ekonomi petani berbasis korporasi. "Gapoktan jangan sekadar tempat kumpul. Mereka harus bisa kolektif membeli pupuk agar lebih murah, sekaligus menjalin kontrak dengan offtaker agar panen terserap. Penyuluh mendorong kelembagaan petani bergerak ke arah itu," tuturnya.

Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 34.000 penyuluh pertanian aktif. Mereka tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari perbukitan Sumatra hingga pesisir Papua. Agar kerja mereka lebih efektif, pemerintah menyiapkan fasilitas pendukung mulai dari kendaraan operasional hingga pelatihan tematik.

"Dengan mobilisasi yang lancar, penyuluh bisa bergerak cepat. Output akhirnya produktivitas meningkat, risiko gagal panen berkurang, dan swasembada pangan bisa tercapai," ujar Acep. Menariknya, kini penyuluh juga mengikuti apel virtual setiap pagi pukul 07.30 WIB. Forum ini menjadi ajang komunikasi langsung antara pusat dan daerah.

Arahan terbaru soal pupuk, teknik tanam, pengendalian hama, hingga distribusi logistik dibahas tuntas. Informasi dari forum itu kemudian segera diturunkan penyuluh ke petani. "Setiap pagi penyuluh wajib menyampaikan kebijakan yang harus dikawal. Konsistensi inilah yang menjaga ritme penyuluhan tetap kuat," kata Acep.

Acep mengakui, salah satu tantangan terbesar adalah keraguan petani terhadap inovasi baru. Untuk itu, penyuluh rutin membuat demplot (lahan percontohan). Metode ini terbukti efektif. Dari satu petak demplot, praktik baik bisa menyebar ke puluhan hektar di sekitarnya.

"Kadang petani baru percaya setelah melihat hasilnya sendiri. Misalnya ketika teknologi pengendalian hama diterapkan, serangan tikus berkurang drastis. Setelah itu mereka baru mau mencoba," ungkapnya.

Menurut Acep, target swasembada pangan bukan sekadar mengejar angka. Lebih penting adalah membangun pondasi agar swasembada berkelanjutan. "Kita tidak ingin swasembada hanya sesaat. Harus berkelanjutan. Itu berarti petani harus sejahtera, kelembagaan mereka kuat, teknologi terintegrasi, dan penyuluh tetap menjadi mitra strategis," pungkasnya.

Musim tanam Okmar adalah momen krusial. Dengan kombinasi benih unggul, pupuk presisi, lahan siap tanam, dan pendampingan penyuluh yang solid, cita-cita swasembada pangan Indonesia kian dekat di depan mata. Di tengah ketidakpastian global, penyuluh hadir sebagai jangkar. Mereka bukan hanya penghubung antara kebijakan dan petani, tetapi juga motor penggerak transformasi pertanian menuju era modern yang lebih tangguh.**Gsh/Yul**



Tingkatkan Pengawasan, BGN Komitmen Jaga Kualitas Pangan





Kepala BGN, Dadan Hindayana meninjau anak yang menjadi korban keracunan MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan keseriusannya memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sejumlah langkah strategis. Mulai dari penunjukan dua Wakil Kepala BGN yang baru, percepatan verifikasi mitra pelaksana, hingga pembentukan Tim Investigasi Khusus untuk menjaga keamanan pangan.

Pasca pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Kepala BGN, Dadan Hindayana memperkenalkan dua pejabat baru yang akan memperkuat jajaran pimpinan lembaga tersebut, yaitu Nanik S. Deyang serta Brigjen (Pol) Sony Sanjaya. Keduanya melengkapi Lodewyk Pusung yang sejak awal menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Penguatan struktur ini juga berkaitan erat dengan peningkatan anggaran.

"Dengan adanya tiga wakil ini, BGN semakin kuat dalam mempercepat capaian kinerja karena masing-masing fokus pada bidang yang spesifik. Beban kerja semakin besar dan cakupan program semakin luas, sehingga tiga wakil sangat diperlukan," kata Dadan.

Menurut Dadan, tahun ini BGN mengelola Rp 71 triliun ditambah cadangan Rp 50 triliun, bahkan pada 2026 akan mengelola pagu anggaran mencapai Rp 268 triliun. "Ini adalah langkah strategis dari Presiden Prabowo Subianto. Dengan dana sebesar itu, BGN harus bergerak lebih cepat, transparan, dan akuntabel," tegasnya.

Sebagai Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang dipercaya menangani bidang komunikasi publik sekaligus investigasi. Dalam keterangannya, ia menegaskan komitmen BGN memperluas cakupan Program MBG ke seluruh pelosok Indonesia dengan pengawasan ketat.

"Saya akan lebih sering berhubungan dengan media, sekaligus memimpin tim investigasi apabila ada dugaan masalah keamanan pangan. Mulai dari proses memasak hingga menu di dapur akan kami teliti untuk meningkatkan pengawasan," jelas Nanik.

Sementara itu, Brigjen (Pol) Sony Sanjaya akan fokus pada operasional organisasi. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. "Program ini tidak bisa dijalankan sendiri. Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Dengan sinergi, solusi yang diciptakan akan lebih efektif," kata Sony.

Sedangkan Lodewyk Pusung akan lebih banyak menangani pengembangan organisasi dan hubungan kelembagaan, memastikan BGN mampu beradaptasi dengan dinamika kebutuhan masyarakat.

Isu Keamanan Pangan

Keamanan pangan memang menjadi isu utama dalam Program MBG, menyusul laporan insiden dugaan keracunan di sejumlah daerah, salah satunya di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Untuk mengetahui kasus tersebut, Dadan Hindayana turun langsung meninjau kasus dugaan keracunan di lokasi tersebut.

Hasil sementara menunjukkan kesalahan teknis, yaitu makanan dimasak terlalu awal sehingga tersimpan terlalu lama sebelum distribusi. Karena itu, dirinya meminta agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai memasak di atas pukul 01.30 malam, sehingga waktu antara memasak dan distribusi tidak lebih dari empat jam.

Mengenai kasus di Banggai, Sulawesi Tengah, ketika SPPG mengganti pemasok bahan baku secara mendadak, Dadan mengingatkan agar pergantian harus dilakukan bertahap. "Jangan sampai kualitas turun hanya karena supplier diganti secara tiba-tiba," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, BGN telah meminta SPPG di dua daerah tersebut menghentikan sementara kegiatan sambil melakukan analisis menyeluruh. Evaluasi juga akan dilakukan pada SPPG baru lain agar kejadian serupa tidak terulang.

Dadan juga mengingatkan pentingnya aspek psikologis. Anak-anak penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan akibat insiden pangan berisiko mengalami trauma. "Anak-anak harus kembali percaya bahwa makanan bergizi gratis ini aman. Itu bagian dari tugas kami juga, bukan hanya soal distribusi makanan, tapi juga pemulihan psikologis," tuturnya.

Dengan struktur organisasi yang lebih solid, transparansi dalam verifikasi, serta langkah konkret membentuk tim investigasi, BGN ingin memastikan Program MBG berjalan tepat sasaran. Program ini diharapkan benar-benar menurunkan angka stunting, memperbaiki status gizi anak-anak, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang paling membutuhkan.

"BGN berdiri untuk kepentingan masyarakat. Kami akan terus menjaga kualitas, transparansi, dan keamanan agar setiap anak Indonesia bisa tumbuh sehat dengan asupan gizi yang layak," pungkas Dadan.

Tim Investigasi Khusus

Sementara itu, untuk mengantisipasi kemungkinan kasus tersebut terjadi lagi, Nanik S. Deyang mengumumkan pembentukan Tim Investigasi Khusus. Tim ini akan menjadi *second opinion* sebelum hasil uji dari BPOM keluar. "Dengan begitu, kami bisa lebih cepat mengidentifikasi penyebab anak-anak sakit dan segera mengambil tindakan," ujarnya.

Menurut Nanik. tim ini akan diisi ahli kimia, farmasi, dan kesehatan. Mereka bertugas meneliti bahan baku, proses memasak, hingga distribusi. BGN juga mewajibkan setiap SPPG menyimpan sampel makanan dalam freezer selama dua hari. Langkah ini dilakukan agar jika terjadi keracunan, sampel bisa segera diuji di laboratorium.

BGN menegaskan komitmennya untuk memperkuat pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul adanya beberapa insiden keamanan pangan di sejumlah daerah.

Sedangkan Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati juga menegaskan, insiden keracunan makanan tersebut menjadi perhatian serius lembaganya. "Kami selalu melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan MBG. Tentunya beberapa insiden keamanan pangan yang terjadi beberapa waktu terakhir menjadi concern utama kami," ujarnya.

Khairul menjelaskan, BGN telah memiliki prosedur serta aturan ketat terkait keamanan pangan dalam tata kelola Program MBG, termasuk pedoman bagi SPPG di lapangan. Sistem pelaporan berkala juga telah diterapkan untuk memperkuat pengawasan.

"Kami juga sudah menerapkan sistem pelaporan berkala dalam melaksanakan fungsi pemantauan dan pengawasan, sehingga Kepala SPPG dapat memberikan laporan maupun pengaduan yang menjadi kendala di lapangan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat sistem pemantauan dan pengawasan program," tuturnya.

Menurutnya, langkah tersebut bukan hanya ditujukan untuk daerah yang mengalami insiden, tetapi juga untuk seluruh penerima manfaat MBG di Indonesia. Hal ini menjadi langkah penting supaya tidak terjadi kasus serupa di masa yang akan datang, bahkan tidak hanya di wilayah yang terjadi insiden, tetapi juga seluruh penerima manfaat MBG di semua daerah.

"Ke depan, kami terus memastikan bahwa makanan yang diterima oleh masyarakat memang makanan yang sehat, layak, bergizi seimbang, dan aman," kata Khairul.

Biro Hukum dan Humas BGN



Euis Sartika, Menjaga Warisan Minuman Lahang

Pernahkah Anda mendengar tentang minuman lahang asli berbahan baku nira aren? Minuman dari sari bunga aren yang segar ini menjadi warisan kuliner nusantara kaya manfaat. Euis Sartika Dewi menjadi salah seorang yang mewarisi minuman tradisional dari Kabupaten Kuningan ini.

Minuman lahang, bukan sekadar pelepas dahaga, melainkan warisan kuliner nusantara yang menyimpan kekayaan rasa dan manfaat. Lahang adalah minuman khas yang berasal dari nira pohon aren, sejenis palma yang banyak tumbuh di daerah tropis, terutama di Indonesia.

Adalah Euis Sartika Dewi, wanita berusia 45 tahun asal Desa Sukarasa, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan Jawa Barat yang turut serta menjaga resep warisan keluarga. "Produk yang dikembangkan saya adalah gula aren organik," ujarnya singkat kepada Tabloid Sinar Tani, beberapa waktu lalu.

Euis pun bercerita di Kecamatan Darma banyak tumbuh tanaman aren liar. Masyarakat di wilayah tersebut memeliharanya secara turun-temurun dan memanfaatkan menjadi minuman.

"Di desa Darma kami memanfaatkan secara turun temurun menjadikan buah yang bermanfaat. Keluarga suami saya asli orang Kuningan, sementara saya sendiri asli Cirebon, sekarang ini saya dipercaya memasarkan," katanya.

Menurut Euis, umumnya petani memanfaatkan dengan mengambil air nira dari sari bunga pohon aren. Petani memanen dengan memangkas, kemudian diolah dan dimanfaatkan menjadi minuman.

Jadi cairan nira ini diperoleh dengan menyadap atau menoreh tangkai bunga pohon aren. Proses penyadapan membutuhkan keahlian khusus agar nira yang dihasilkan berkualitas tinggi dan tidak cepat masam.

Euis mengungkapkan proses pembuatan minuman lahang. Langkahnya, aren yang sudah dipanen diolah dengan cara dimasak sampai mengental dan mengering, serta menyusut airnya. Hasilnya adalah gula aren semut.

"Saya berharap banyak yang dapat menikmati minuman tradisional ini. Ke depan saya akan terus mempertahankan warisan keluarga ini dengan satu bahan saya bisa menghasilkan tiga produk," katanya.

Dalam memasarkan minuman lahang, Euis bekerjasama dengan dinas daerah dan rumah makan yang ada di Kuningan. Saat ini omzet usahanya tersebut berkisar Rp 6 jutaan perbulan. "Usaha saya ini masih mikro sekali. Harapan saya kedepan usaha keluarga ini terus berkembang," ujarnya.

Euis berharap ke depan ada investor atau pemerintah melirik usaha minuman tradisional Kabupaten Kuningan ini. Apalagi di wilayahnya, banyak petani dan pelaku usaha gula aren yang juga masih memerlukan bimbingan dan bantuan.

"Mudah-mudahan ada investor yang melirik memajukan usaha mikro, karena di daerah kami banyak sekali petani gula aren, sekitar 200 petani. Harapan saya pemerintah mau melirik usaha kami sehingga bisa usahanya mandiri," ujar ibu 5 orang anak ini.

Manfaat Lahang

Di balik kesegarannya, lahang menyimpan segudang manfaat kesehatan. Minuman ini kaya akan mineral penting seperti kalium, kalsium, fosfor, dan zat besi. Selain itu, Lahang juga merupakan sumber energi alami karena kandungan glukosa dan fruktosa yang tinggi, sehingga memberikan dorongan energi yang cepat tanpa efek samping seperti minuman berenergi buatan. Elektrolit alami dalam lahang juga sangat baik untuk menjaga hidrasi tubuh, terutama setelah beraktivitas atau saat cuaca panas.

Bagaimana cara menikmati lahang? Minuman lahang paling nikmat disajikan dalam keadaan dingin atau ditambahkan es batu, terutama saat cuaca terik. Rasanya yang manis alami dan sedikit asam akan terasa sangat menyegarkan. Biasanya minuman ini bisa ditemukan di pasar tradisional atau sentra oleh-oleh di daerah penghasil aren.

Meskipun Lahang umumnya dinikmati murni, kita bisa berkreasi untuk menambah kesegaran. Cukup siapkan lahang segar, es batu secukupnya, dan irisan jeruk nipis atau lemon sebagai penambah aroma dan rasa segar. Campurkan semua bahan dalam gelas saji.

Untuk sentuhan modern, kita juga bisa menambahkan sedikit irisan buah-buahan seperti nanas atau markisa. Minuman ini sangat cocok sebagai teman bersantai di sore hari atau sebagai minuman pembuka setelah beraktivitas.

Untuk menjaga kesegarannya, lahang sebaiknya disimpan di lemari es dan dikonsumsi dalam waktu 1-2 hari. Jika disimpan terlalu lama, proses fermentasi akan terus berjalan, mengubah lahang menjadi tuak. Jadi pastikan memilih lahang yang masih segar dan belum terlalu banyak berfermentasi untuk mendapatkan manfaat dan rasa terbaiknya. **Echa/ Yul**

Kenali **Minuman Lahang**



Sejarah mencatat, lahang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat pedesaan di banyak wilayah Indonesia, diminum sebagai penyegar dan penambah energi alami.

Secara tampilan, lahang memiliki warna keruh keputihan hingga kuning kecoklatan dengan aroma manis yang khas. Sensasi rasanya unik, perpaduan manis alami dengan sedikit sentuhan asam fermentasi yang ringan, memberikan kesegaran instan. Nira aren sendiri adalah cairan manis yang keluar dari tandan bunga jantan pohon aren.

Namun cairan ini sangat rentan terhadap fermentasi alami, sehingga petani biasanya menambahkan sedikit kapur sirih atau rempah tertentu sebagai pengawet alami. Selain itu juga untuk menjaga kesegaran lahang lebih lama sebelum dikonsumsi.

Kualitas Lahang sangat bergantung pada bagaimana nira aren diproses setelah disadap. Nira segar yang baru diambil dari pohon akan memiliki rasa paling manis dan kandungan nutrisi paling optimal.

Namun, seiring waktu, nira akan mengalami fermentasi dan menjadi tuak, minuman beralkohol tradisional. Karena itu, konsumsi lahang yang otentik adalah menikmati nira aren murni yang masih dalam kondisi segar, sebelum proses fermentasi berlanjut. **Echa/Yul**

Bioamelioran: Cara Ramah Lingkungan Tingkatkan Produksi Kedelai

Oleh :
Suherman (Dosen Universitas Muhammadiyah Parepare)

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan kebutuhan kedelai yang sangat tinggi. Sayangnya, lebih dari 60 persen kebutuhan nasional masih bergantung pada impor. Rendahnya produksi kedelai lokal salah satunya disebabkan dominasi lahan kering yang umumnya miskin unsur hara dan sulit menahan air.

Kondisi ini membuat kedelai tidak bisa tumbuh optimal. Selama ini pupuk kimia menjadi solusi yang paling banyak digunakan, tetapi cara tersebut tidak hanya menambah beban biaya petani, melainkan juga berisiko merusak kesuburan tanah dalam jangka panjang.

Karena itu, muncul pertanyaan penting, adakah cara yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan?

Bioamelioran: Bahan Ajaib dari Limbah Organik

Sebuah penelitian yang dilakukan di lahan kering Parepare, Sulawesi Selatan, menemukan jawabannya melalui penggunaan bioamelioran, yaitu bahan organik yang berfungsi memperbaiki kondisi tanah. Dalam penelitian ini, para peneliti menggunakan tiga bahan sederhana yang mudah didapat di sekitar petani, yakni kotoran ayam, kotoran sapi, dan arang sekam.

Kotoran ayam kaya akan nitrogen yang dibutuhkan untuk pertumbuhan daun, kotoran sapi memiliki kandungan karbon tinggi yang mampu memperbaiki struktur tanah, sementara arang sekam membantu meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air dan udara.

Ketiga bahan tersebut kemudian dicoba dalam berbagai kombinasi dan dosis, lalu hasilnya dibandingkan dengan lahan tanpa perlakuan.

Produksi Kedelai Meningkat Lebih dari Dua Kali Lipat

Temuan yang diperoleh sangat mengejutkan. Tanaman kedelai yang diberi campuran bioamelioran pada dosis 20 ton per hektar tumbuh jauh lebih subur dibandingkan kontrol.

Pertumbuhan daun meningkat hampir dua kali lipat, berat kering tanaman melonjak hingga 168,72 gram per rumpun, lebih dari dua kali lipat dibandingkan lahan tanpa perlakuan yang hanya mencapai 75,31 gram. Puncaknya, hasil panen kedelai per hektar meningkat sangat signifikan.

Lahan dengan bioamelioran campuran dosis 20 hingga 30 ton per hektar mampu menghasilkan 2,5 hingga 2,8 ton, jauh di atas rata-rata nasional, sementara lahan kontrol hanya menghasilkan 1,2 ton. Menariknya, meski hasil panen meningkat drastis, kualitas biji kedelai tetap stabil di semua perlakuan.

Solusi Efisien dan Berkelanjutan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dosis 20 ton per hektar merupakan pilihan paling efisien. Dengan jumlah yang tidak terlalu besar, hasil panen yang diperoleh hampir sama dengan dosis tertinggi, sehingga lebih hemat biaya. Selain meningkatkan hasil, penggunaan bioamelioran juga memberi manfaat lingkungan karena memanfaatkan limbah organik seperti kotoran ternak dan arang sekam, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.

Pendekatan ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals*, terutama terkait peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan limbah yang lebih bertanggung jawab, serta aksi terhadap perubahan iklim.

Temuan ini membawa harapan baru bagi petani kedelai di lahan kering. Dengan memanfaatkan limbah organik yang tersedia di sekitar mereka, hasil panen bisa meningkat lebih dari dua kali lipat, biaya produksi dapat ditekan, dan kesehatan tanah tetap terjaga. Bioamelioran bukan hanya inovasi, melainkan kunci menuju kemandirian kedelai dan pertanian berkelanjutan di Indonesia.



Kolom

Saprodi MT Ok-Mar 2025 : Kebijakan dan Kondisi di Lapangan



Oleh: **Memed Gunawan**

Sarana produksi untuk Musim Tanam Oktober-Maret menurut Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) maupun kementerian terkait tidak perlu terlalu dirisaukan. Ada stok yang cukup, baik pupuk maupun benih. Dengan pembaruan regulasi pupuk bersubsidi (Perpres 6/2025 dan Permentan 15/2025) serta penetapan HET, diharapkan pupuk dan benih mencukupi dan harganya tetap dalam batas yang dapat dijangkau petani kecil.

Pemerintah telah merombak tata kelola pupuk bersubsidi melalui Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Sebagai pelaksanaan, Kementerian Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 15 Tahun 2025 yang mengatur tata cara pelaksanaan dari Perpres tersebut. Regulasi baru mewajibkan petani yang ingin menebus pupuk subsidi harus terdaftar dalam e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang diperbarui setiap 4 bulan.

Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, misalnya Urea Rp 2.250/kg dan NPK Rp 2.300/kg (per keputusan yang berlaku) untuk menjaga keterjangkauan bagi petani. Menurut PIHC, data terakhir menunjukkan bahwa baru 58,7 persen dari pupuk bersubsidi yang ditebus petani. Pengecer berperan besar karena titik serah yang sudah ditetapkan yaitu Gapoktan, Kopdakan dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) belum berfungsi maksimal.

Ketersediaan benih menurut Direktur Perbenihan, Ditjen Tanaman Pangan Pangan cukup melimpah. Tersedia Stok 48 ribu ton untuk kebutuhan musim tanam Ok-Mar 2025, dan dapat dipastikan varietas tepat sasaran.

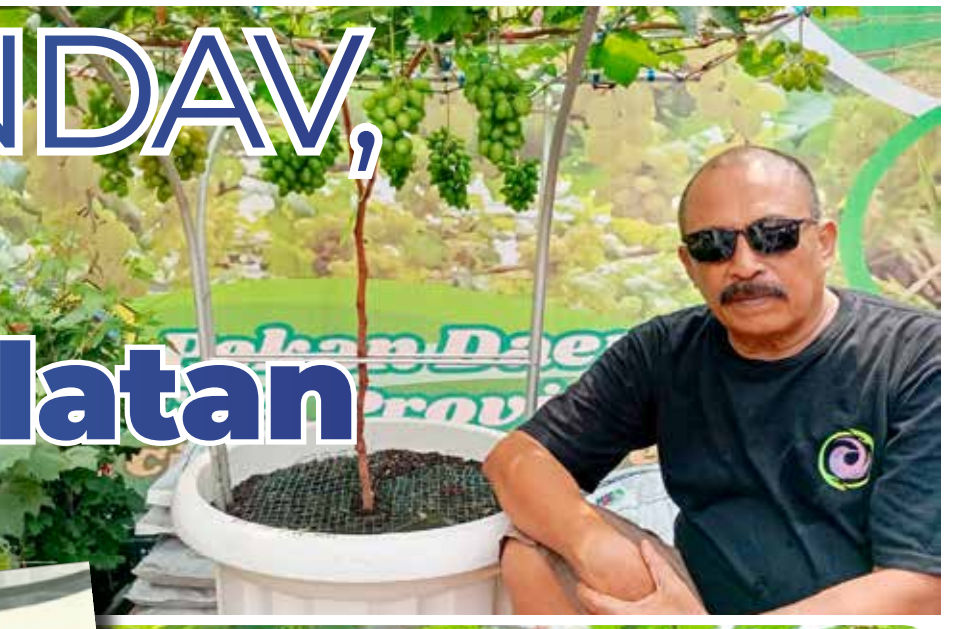
Secara konseptual, Reformasi Distribusi Pupuk diarahkan agar penyaluran menjadi lebih mudah, tepat sasaran, dan pemangkasan regulasi birokrasi lintas lembaga agar pelayanan di tingkat lokal menjadi lebih cepat. Dengan kebijakan-kebijakan ini, potensi kemampuan petani untuk mengakses pupuk subsidi seharusnya lebih baik, terutama jika regulasi dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.

Proses ini terus berjalan, tetapi suara masyarakat di lapangan tetap harus diperhatikan pengambil kebijakan. Kasus yang muncul seperti harga yang tidak sesuai dengan HET, ketidaksesuaian jenis pupuk yang dibutuhkan petani dan kebutuhan akan jenis pupuk tertentu seperti pupuk hayati dan organik yang terbukti di beberapa daerah mampu mengangkat produktivitas.

Intinya ada keberagaman akan kebutuhan dan pola pelayanan kepada petani tergantung kepada kondisi daerah, komoditas yang dikembangkan, kesiapan lembaga pelayanan yang membuat perbedaan kebutuhan, kuantitas dan jenis pupuk dan pelayanan antar daerah. Meskipun ada regulasi, di tingkat desa/kios sering terjadi pelanggaran harga (melebihi HET), pupuk dijual di luar kemasan resmi, atau biaya pengantaran tambahan. Biaya distribusi dan rendahnya insentif bagi Gapoktan, Kopdakan, dan KDMP serta pengecer tidak memenuhi tingkat harga HET.

Belum lagi kemampuan petani kecil, dengan modal rendah dan pendapatan pas-pasan, mungkin tidak punya likuiditas cukup untuk membeli input di awal musim, terutama ketika pembayaran dilakukan sebelum panen. Memang perbaikan harus dilakukan secara terus menerus karena permasalahan terus berkembang.

PONJAY BENDAV, Anggur Lokal Tangerang Selatan



Pengembangan anggur lokal di Tangerang Selatan terus menunjukkan kemajuan. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia (ASPAI) Tangerang Selatan sukses melaksanakan uji observasi terhadap varietas anggur introduksi bernama Ponjay Bendav.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN

Tanda Daftar Varietas Tanaman

VARIETAS LOKAL
NOMOR : 1771/A.9/09/2025

Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Permohonan Varietas Turunan Esensial, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penamaan dan Pendaftaran Varietas Tanaman, bersama ini kami memberikan Tanda Daftar Varietas Lokal kepada :

Nama Pemohon : WALIKOTA TANGERANG SELATAN
Alamat : Jl. Adi Sucipto Blok A No.8 Kel. Serua Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan
Tanggal Penerimaan Pendaftaran : 01 September 2025
Jenis Tanaman : Anggur (*Vitis vinifera* ssp.)
Nama Varietas : Ponjay BenDav

Dengan diberikan varietas tersebut telah terdaftar di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, dan menjadi milik masyarakat di wilayah yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dicatat dalam Daftar Umum PVT, serta diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

Jakarta, 02 September 2025
Kepala Pusat

Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Si.
NIP 196802261993032002



Kegiatan ini digelar di kebun milik Kelompok Tani Cipayung (Ketan-cap), Komunitas Anggur Tangsel (KAT), yang berlokasi di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat. Uji observasi ini merupakan langkah penting dalam proses pendaftaran Ponjay Bendav sebagai varietas lokal.

Peneliti dari Pusat Riset Tanaman Pangan, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Muhammad Iskandar Ishaq mengatakan, anggur introduksi dapat didaftarkan sebagai varietas lokal jika telah lama dibudidayakan di Indonesia dan menunjukkan perbedaan karakteristik dari varietas aslinya.

"Cukup ada satu karakter morfologis atau agronomis yang berbeda, sudah bisa didaftarkan sebagai varietas," kata Iskandar yang menjadi ketua tim penguji. Ponjay Bendav merupakan hasil budidaya dari varietas Transfiguration asal Ukraina. Nama Ponjay Bendav berasal dari kombinasi dua nama yaitu "Ponjay" dari Kelurahan Pondok Jaya tempat induk tanaman ditanam, dan "Bendav" sebagai bentuk penghargaan kepada Walikota Benyamin Davnie.

Dikatakan, setelah melalui masa tanam dan adaptasi di wilayah Tangerang Selatan, anggur ini memperlihatkan ciri khas tersendiri yang membedakannya dari varietas asal. Karena proses budidayanya dilakukan petani tanpa pemuliaan, sehingga varietas ini layak didaftarkan sebagai varietas lokal.

Proses uji observasi ini melengkapi kegiatan karakterisasi sifat morfologis dan agronomis yang sudah dilakukan sejak 2023. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sertifikat tanda daftar sebagai bukti kepemilikan. Adapun dokumen hasil uji observasi akan digunakan bersama dokumen uji kebenaran dari balai pengawasan dan sertifikasi benih untuk mengajukan Surat Keputusan (SK) peredaran dari Kementerian Pertanian.

11 Varietas

Ketua 1 Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ASPAI, Roy Nurdin menyatakan, ASPAI menargetkan pendaftaran 11 varietas anggur introduksi lainnya sebagai varietas lokal. "Pendaftaran varietas adalah bagian dari gerakan kami untuk mengurangi impor anggur. Lebih bagus lagi kalau kita bisa swasembada anggur," ujar Roy.

Roy berharap pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya turut memberikan dukungan agar program pendaftaran varietas lokal dan pengembangan budidaya anggur bisa berjalan lancar.

Sementara itu Penyuluh pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tangerang Selatan, Febry Putra menyampaikan, pihaknya sangat mendukung proses legalisasi varietas lokal ini. "Penting bagi kami untuk melepas varietas lokal anggur Ponjay Bendav, karena ini menjadi kebanggaan warga Tangsel. Saya ditunjuk sebagai operator untuk mengunggah dokumen pendaftaran secara daring," ujarnya.

Dukungan terhadap pengembangan anggur lokal juga datang dari istri Gubernur Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni yang memanen anggur Ponjay Bendav langsung dari kebun milik Kelompok Tani Cipayung. "Senang sekali bisa langsung memanen anggur. Rasanya manis dan menyenangkan. Lelah pun terbayar," ucap Tinawati.

Ia optimis bahwa budidaya anggur di Tangerang Selatan memiliki masa depan cerah, termasuk dari sisi pasar. Acara panen tersebut juga dihadiri oleh Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Ia menyampaikan komitmennya untuk menjadikan Tangerang Selatan sebagai kota penghasil anggur.

"Kami melihat potensi besar. Lahan seluas 300 meter persegi saja sudah bisa produktif. Apalagi kalau lebih luas. Kami sudah komunikasi dengan para pemilik lahan, baik pengembang maupun institusi. Tinggal intensifkan komunikasi dengan petani," kata Benyamin, walikota Tangerang Selatan periode 2025–2030.

Sementara itu Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Banten Erry Yanuar menyatakan, keberhasilan ini merupakan solusi cerdas di tengah keterbatasan lahan pertanian di wilayah perkotaan seperti Tangsel. "Kota Tangsel tidak memiliki lahan sawah, jadi solusinya adalah urban farming dan penanaman anggur," katanya.

Selama ini Ia menambahkan, Indonesia masih mengimpor anggur dengan nilai mencapai Rp 7 triliun per tahun. Dengan inisiatif lokal seperti Ponjay Bendav, Erry berharap kontribusi petani dalam negeri dapat menekan impor hingga 5 persen. "Kita ini menjadi satu-satunya yang telah memiliki varietas anggur lokal bernama Ponjay Bendav. Ini harus terus dikembangkan," katanya.

Keunggulan budidaya anggur di Indonesia, menurutnya, terletak pada kemampuannya beradaptasi di berbagai dataran dan fleksibilitas panen sepanjang tahun. Jika di negara empat musim, panen anggur terbatas, maka di Indonesia bisa panen kapan saja. Ini menjadi keunggulan luar biasa.

Selain wilayah Tangerang Selatan (Tangsel), daerah lain di Banten seperti Serang, Cilegon, Pandeglang, dan Kabupaten Tangerang sudah mulai menanam anggur, namun belum menghasilkan varietas lokal seperti Ponjay Bendav.

Pembina DPP ASPAI Tangerang Selatan, Lista Hurustiati mempunyai harapan besar ke depan, anggur Tangsel bisa mengisi toko buah modern. Jika malang terkenal dengan buah apel, maka Tangsel memiliki anggur.

Saat ini pihaknya juga sedang mengembangkan olahan keripik dari daun anggur. "Kami sedang proses inovasi produk keripik daun anggur," ujar Lista yang juga dikenal sebagai Ibu Anggur Tangerang Selatan. Karena itu, Ia berharap anggota ASPAI Tangsel juga bisa terlibat dalam pembibitan, penanaman, dan perawatan.

Namun Lista mengakui, kendalanya saat ini adalah keterbatasan *green house*. Ia pun berharap adanya bantuan tambahan berupa *green-house* agar pengembangan tanaman anggur di Tangerang Selatan bisa semakin maju.**Herman/Yul**

Hari Tani Nasional
Momentum Pengingat Bahaya Alih Fungsi Lahan



Tanggal 24 September menjadi bagian tersendiri sejarah masyarakat petani di Nusantara. Pemerintah telah menetapkan tanggal tersebut Hari Tani Nasional. Hari bersejarah tersebut menjadi momentum pengingat bahaya alih fungsi lahan pertanian yang kian masif.

Sejarah Hari Tani Nasional sendiri lahir di masa pemerintahan Orde Lama dan ditetapkan Presiden Soekarno dengan Keppres No. 169 Tahun 1963 tentang Hari Tani. Tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Kelahiran UUPA adalah perwujudan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: "Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" UUPA menjadi landasan kebijakan pemerintah terkait kepemilikan tanah pertanian, salah satunya menghilangkan sistem pemerasan oleh tuan tanah.

Dalam momentum Hari Tani Nasional, Dekan Fakultas Pertanian IPB University, Prof Suryo Wiyono mengingatkan, tren alih fungsi lahan sawah di Indonesia sudah pada tahap mengkhawatirkan. Luas lahan sawah di Indonesia hanya sekitar 7,3 juta ha. Dibandingkan negara lain, angka ini sangat kecil.

"Secara global, Indonesia berada di peringkat 130 dari 180 negara untuk ketersediaan lahan pertanian per kapita. Situasi ini berdampak pada rendahnya Global Food Security Index kita," ungkap Prof Suryo.

Data Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS), luas sawah nasional terus menurun, dari sekitar 8,1 juta ha tahun 2015 menjadi 7,4 juta ha pada 2019. Laju konversi sawah pun tidak kecil, tercatat mencapai 60.000–80.000 ha per tahun pada 2021, bahkan penelitian lain menunjukkan mencapai 96.512 ha per tahun pada periode 2000–2015. Bagaimana tahun ini? Pasti makin menyusut.

Lebih mengkhawatirkan Prof Suryo mengingatkan, alih fungsi lahan terutama terjadi di wilayah subur seperti Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Faktor utamanya adalah tekanan ekonomi.

"Jika nilai ekonomi lahan nonpertanian lebih tinggi, misalnya untuk perumahan atau industri, maka lahan sawah akan cepat terkonversi. Satu meter persegi tanah bisa bernilai miliaran rupiah, sementara hasil panen padi tidak sebanding," tuturnya.

Masifnya alih fungsi lahan tersebut menurutnya, menjadi ancaman serius terhadap ketahanan pangan. Kalkulasinya, jika konversi mencapai 100 ribu ha per tahun, maka dalam 10 tahun sebanyak 1 juta ha akan hilang. Padahal sawah di Indonesia hanya 7,3 juta ha, sehingga dampaknya luar biasa bagi pangan nasional.

Strategi Solutif

Sebagai strategi solutif, ia menyebut tiga hal penting. Pertama, melindungi lahan subur di sentra produksi. Kedua, membuka area baru untuk pertanian. Ketiga, meningkatkan produktivitas lahan yang ada. "Kita harus melihat Undang-Undang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan No. 41 Tahun 2009. Implementasinya perlu diperkuat dengan insentif ekonomi agar petani mau mempertahankan lahannya," tegas Prof Suryo.

Momentum Hari Tani Nasional, tambah Prof Suryo, seharusnya menjadi pengingat bersama bahwa melindungi lahan pertanian bukan hanya soal menjaga produksi pangan, Namun juga menjaga masa depan generasi mendatang agar tetap memiliki akses pada pangan yang cukup, aman, dan terjangkau.

Ia menilai, tanpa komitmen serius pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, ancaman krisis pangan akan semakin nyata. "Alih fungsi lahan harus dipandang sebagai isu strategis. Jika dibiarkan, kedaulatan pangan akan semakin rapuh," ujarnya seperti dikutip dari laman *IPB University*.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Prof Baba Barus juga mengingatkan perlunya perlindungan lahan sawah sebagai fondasi ketahanan pangan. Saat ini, ia mencatat ada 3 juta ha sawah di Indonesia yang belum masuk dalam kategori lahan yang dilindungi secara formal.

Menurutnya, untuk menekankan laju konversi lahan yang terus terjadi harus melalui kebijakan yang tegas, konsisten, dan berbasis pada tata ruang. Indonesia memiliki sekitar 7,3 juta ha sawah. Secara teori, jumlah ini cukup. Tapi, dalam kenyataannya distribusi dan pemanfaatannya tidak merata. Hasil perhitungan cepat, ada 23 provinsi mengalami defisit, sementara hanya 14 provinsi yang surplus.

Saat diskusi daring yang digelar Forum Mahasiswa Pascasarjana IPB University, Prof. Baba juga mengungkapkan, persoalan pangan tidak hanya soal ketersediaan, tapi juga akses, distribusi, hingga daya beli masyarakat. "Kalau kita bicara angka global, Indonesia seakan tidak kekurangan beras. Namun, isu distribusi dan kemampuan membeli menjadi tantangan lain," ujarnya.

Prof memperkirakan konversi sawah di Indonesia diperkirakan mencapai 100–150 ribu ha per tahun. Kebijakan perlindungan lahan sebenarnya sudah ada sejak 1990-an, termasuk Undang-Undang No. 41 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Namun ia menyesalkan, implementasi di daerah masih lemah karena banyak pemerintah kabupaten belum serius memasukkan perlindungan sawah dalam tata ruang.

"Kalau suatu sawah dilindungi, maka harus ada peraturan daerah (perda) dengan peta spasialnya. Sayangnya, banyak kabupaten yang membuat perda tanpa peta. Akibatnya, perlindungan itu tidak berjalan efektif," ungkapnya.

Selain itu, ia memperkirakan sekitar 3 juta ha sawah di Indonesia belum masuk dalam kategori lahan yang dilindungi secara formal. Kondisi ini, menurut Prof Baba, berpotensi meningkatkan alih fungsi lahan. "Kalau perlindungan tidak kuat, konversi sawah bisa terjadi dengan cepat," tambahnya.

Dari pengalaman lebih 20 tahun mengkaji perlindungan lahan, Prof Baba menekankan perlunya mempertimbangkan variabel kritis seperti ketersediaan air, produktivitas, serta ketergantungan petani terhadap lahan. "Ada wilayah yang petaninya sangat bergantung pada sawah. Jika lahan mereka dikonversi, dampaknya tidak hanya pada produksi pangan, tetapi juga kesejahteraan petani," katanya.

Prof Baba mengingatkan kebijakan perlindungan sawah harus dilihat sebagai strategi jangka panjang. "Kalau perlindungan berjalan konsisten, kita bisa menjaga ketahanan pangan sekaligus melindungi petani. Tapi kalau tidak, ancaman konversi lahan akan terus menghantui," tegasnya. **Yul**

Pemanis Alternatif, Stevia Lebih Aman bagi Kesehatan



Publik sempat dihebohkan di media sosial dengan pernyataan seorang figur publik yang menyebut konsumsi stevia dalam jangka panjang berbahaya dan bisa memicu diabetes hingga kanker. Benarkan mengonsumsi stevia yang selama ini dianggap sebagai pemanis yang aman bagi penderita diabetes justru berbahaya?

Prof Nuri Andarwulan, Guru Besar IPB University dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan sekaligus peneliti South-East Asia Food And Agricultural Science And Technology Center (SEAFAST) dengan tegas membantah klaim tersebut. Stevia itu menurutnya, masuk ke kelompok pemanis alami. Senyawanya, yaitu steviol glikosida, diekstrak dan dimurnikan dari daun *Stevia rebaudiana*.

Bahkan kata Prof. Nuri, di Indonesia penggunaannya sudah diregulasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan mengikuti standar Codex Alimentarius Commission, badan pangan dunia di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada bukti ilmiah maupun pernyataan resmi dari World Health Organization (WHO) yang menyebut pemanis non-nutritif, termasuk stevia, berbahaya jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Justru sebagian besar data menunjukkan adanya risiko penyakit tidak menular, terutama diabetes, lebih banyak terkait dengan pemanis buatan sintetik, bukan pemanis alami seperti stevia.

Menurutnya, penyebab meningkatnya risiko diabetes bukan semata dari stevia, melainkan pola makan berlebih. Pemanis buatan atau pemanis alami biasanya tidak memberikan sensasi manis utuh seperti gula. Akibatnya, orang cenderung mencari makanan tambahan lain, sehingga asupan kalori berlebih yang memicu obesitas dan berujung diabetes.

Klaim Terlalu Dini

Terkait isu stevia menyebabkan kanker, Prof Nuri menilai klaim tersebut terlalu dini. “Hubungan antara pemanis buatan dengan kanker masih sebatas hipotesis. Belum ada bukti ilmiah yang kuat dan diakui secara internasional yang menyatakan pemanis buatan, apalagi pemanis alami seperti stevia, menyebabkan kanker,” tegasnya seperti dikutip dari laman IPB University.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa konsumsi pemanis diatur secara ketat melalui batas aman harian atau Acceptable Daily Intake (ADI). ADI adalah jumlah maksimum yang bisa dikonsumsi setiap hari sepanjang hayat tanpa menimbulkan risiko kesehatan. Angka ini ditetapkan oleh para ahli melalui Codex dan diadopsi oleh BPOM.

Meski begitu, aturan ini berlaku untuk masyarakat umum yang sehat. “Untuk kelompok sensitif atau dengan kondisi kesehatan khusus, sebaiknya menghindari bahan tambahan pangan, termasuk pemanis,” tambahnya.

Prof Nuri juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian figur publik dalam menyampaikan informasi kesehatan. Untuk itu, seorang *content creator* atau *influencer* perlu menyusun materi dengan matang. Sebab, jika informasi yang disampaikan keliru, maka masyarakat bisa salah paham. “Pemerintah dan akademisi akhirnya harus mengklarifikasi, yang tentu menghabiskan tenaga, waktu, serta biaya,” ujarnya.

Prof Nuri menegaskan bahwa pemanis, baik alami maupun buatan, harus dipahami sebagai bahan tambahan pangan, bukan pengganti gula sepenuhnya. “Gunakan pemanis untuk mengurangi konsumsi gula, bukan menggantinya seratus persen, karena tubuh tetap membutuhkan gula. Semua regulasi terkait pemanis dapat diakses secara terbuka melalui laman BPOM,” katanya mengingatkan.

Pemanis Buatan

Perlu diketahui gula stevia berasal dari tanaman *stevia rebaudiana* yang ditemukan ahli botani bernama Antonio Bertoni pada 1887. Sejak itu, masyarakat di Paraguay dan Brazil menggunakan stevia sebagai pemanis buatan.

Ternyata, di dalam daun stevia mengandung senyawa bercita rasa manis, yaitu *stevioside* dan *rebaudioside*. Bahkan rasa manisnya diklaim ratusan kali lipat lebih tinggi daripada gula biasa. Karena rasanya yang sangat manis, penggunaan gula stevia tidak sebanyak gula pasir.

Cara tersebut menyumbang lebih sedikit kalori dalam tubuh, sehingga tidak berdampak pada berat badan secara signifikan. Karena lebih rendah kalori ketimbang gula biasa, gula stevia juga tidak mengandung karbohidrat, sehingga baik di-konsumsi pengidap diabetes.

Sementara karbohidrat bisa memicu kenaikan glukosa atau kadar gula darah secara signifikan. Itu sebabnya, pengidap diabetes disarankan mengurangi asupan karbohidrat untuk menstabilkan kadar gula darah.

Alasan lainnya, gula stevia lebih baik bagi penderita diabetes karena efektif menurunkan indeks glikemik (GI) makanan. GI merupakan indikator seberapa cepat makanan berkarbohidrat meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh. Dengan GI yang rendah, stevia berdampak pada penurunan kadar gula darah dalam tubuh, meski dalam tingkatan rendah.

Bagi yang suka membuat makanan, stevia bisa digunakan sebagai pengganti gula biasa untuk masakan rumahan dan kue. Namun, perlu diketahui juga, jika gula jenis ini tidak dimasak dengan cara yang tepat, stevia bisa menimbulkan rasa pahit.

Ketika mengganti gula biasa dengan stevia, makanan yang diolah dengan cara dipanggang tidak memiliki rasa dan tekstur yang sama dibanding menggunakan gula biasa. Sebab, stevia mengalami proses reaksi yang memicu terjadinya perubahan warna jadi cokelat keemasan dan sedikit rasa pahit. Stevia juga menambah tekstur makanan yang dipanggang menjadi lebih keras.

Terlepas dari manfaat stevia sebagai pengganti gula. Untuk meminimalisir rasa pahit yang ditimbulkan stevia, dalam membuat makanan bisa menggunakan campuran gula biasa berskala 1:1. Menurut *Food and Drug Administration (FDA)*, batas maksimal penggunaan harian stevia adalah 4 miligram per kilogram berat badan.

Stevia juga tidak memicu efek samping jika hanya digunakan sebagai pemanis buatan untuk masakan. Sederhananya, mengon-sumsi gula stevia lebih menyehatkan ketimbang gula biasa. **Yul**

Marson, Hijaukan Lahan Gersang El Tari dengan Pepaya

Dari buruh pelabuhan yang bergelut dengan bongkar muat, Marson mengubah lahan kosong menjadi kebun pepaya produktif. Bahkan, kini anak-anaknya kuliah berkat kerja keras dan tekadnya.



"Saya tidak tamat SD, tapi anak-anak saya harus sekolah tinggi. Itu impian saya," ujar Mariono Marson (49) sambil menatap pepaya yang mulai ranum di kebunnya. Mata pria yang sehari-harinya menjadi buruh bongkar muat di Pelabuhan Lorens Say Maumere, Kabupaten Sikka, itu berkaca-kaca, menyimpan rasa haru sekaligus tekad yang luar biasa.

Di balik aktivitas berat mengangkat peti dan kontainer, Marson menyimpan dunia lain, kebunnya. Lahan kosong milik Pemkab Sikka di kawasan El Tari, yang dulu gersang dan terbengkalai, kini berubah menjadi hamparan hijau produktif. Sekitar 600 pohon pepaya California dan jenis lain berjajar rapi, masing-masing berjarak satu meter. Dari kebun ini, buah pepaya tak sekadar makanan, melainkan harapan yang tumbuh, buah dari ketekunan yang tak kenal lelah.

Perjalanan Marson ke dunia pertanian dimulai saat pandemi Covid-19. Aktivitas di pelabuhan menurun drastis, membuat pendapatannya tak menentu. Di tengah kesulitan, Marson tidak pasrah. Ia mulai menanam 20 pohon pepaya dan tomat di waktu luang. "Awalnya iseng saja. Tapi ternyata hasilnya menjanjikan," kenangnya.

Semangat itu menular. Marson menambah jumlah pohon, pertama 100, kemudian 200 tanaman, hingga akhirnya fokus pada pepaya. Kini, kebun itu menjadi sumber penghasilan utama dan modal untuk masa depan anak-anaknya. "Kalau kita tekun, pasti ada hasil," kata Marson sambil mengelus batang pepaya yang mulai berbuah merah ranum.

Kebun pepaya Marson cukup istimewa, karena perawatannya. Seluruh pohon dipelihara tanpa pupuk kimia. Pupuk kompos, tangan terampil, dan ketekunan menjadi rahasia manisnya pepaya. Kini dari kebun ini, ia rutin memasok buah ke Pasar Alok dan Pasar Wuring. Dalam seminggu, Marson bisa memanen antara 50 hingga 500 buah, tergantung musim dan ukuran, dengan harga Rp7.000–Rp10.000 per buah.

Selain merawat, Marson juga menyiapkan bibit sendiri. Sebagian berasal dari pepaya pasar yang ia semai ulang. "Bibit dari toko sering menghasilkan pohon betina yang tidak berbuah. Kalau ada pohon rusak atau dimakan ulat, saya ganti dengan bibit baru. Semua saya rawat sendiri," ujar ayah tiga anak itu.

Bagi Marson, kebun bukan sekadar ladang uang. Ia menanam mimpi untuk anak-anaknya. Dari hasil kebun, anak sulungnya kini kuliah di Jurusan Akuntansi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, sementara dua anak lainnya duduk di bangku SMP. "Saya tidak tamat SD, tapi anak-anak saya harus sekolah tinggi. Itu impian saya," ucapnya lagi, kali ini dengan senyum yang terselip haru.

Kini, pepaya merah ranum itu bukan sekadar buah. Ia simbol perjuangan, kesabaran, dan impian yang tumbuh di tengah keterbatasan. Dari buruh pelabuhan yang tak tamat SD, Marson membuktikan kerja keras dan tekad bisa mengubah nasib. Lahan gersang di El Tari kini menjadi ladang harapan, tempat mimpi dan ketekunan berbuah manis, untuk dirinya, dan untuk depan anak-anaknya.

Setiap pohon yang dirawat adalah cerita, setiap buah yang dipanen adalah pelajaran, dan setiap langkahnya adalah bukti bahwa kesempatan bisa datang dari mana saja. Marson menanam bukan hanya pepaya, tapi mimpi, harapan, dan keberanian untuk memulai lagi.

Nattasya/Yul



BADAN PANGAN NASIONAL

Sinar Tani

NUSANTARA MELON FEST 2025

#1 NUSANTARA MELON FEST 2025

UPAYA MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN NASIONAL
DAN PENYEDIAAN SUMBER MAKANAN BERGIZI.

GUEST STAR



17-19 OKTOBER 2025

ARUNIKA EATERY DESA CISANTANA
KEC. CIGUGUR KAB. KUNINGAN

DAY 1

- Nusantara Expo 2025
- Farm Inovation Talkshow
- Nusantara Entertainment
- Opening Ceremony "Gebyar Pesona Nusantara"

DAY 2

- Nusantara Expo 2025
- Rekor Muri Parade Pahlawan Ketahanan Pangan
- Rekor Muri Parade 2.000 Anak Muda Berwastra Tradisional
- Mega Konser SETIA BAND

DAY 3

- Nusantara Expo 2025
- NUSANTARA SEHAT: Nusantara Melorun Race, MeloPoundFit
- NUSANTARA BUSINESS MATCHING AWARDING
- CLOSSING CEREMONY Konser NDX AKA



GRAND PRIZE

1 Unit Daihatsu Ayla



2 Paket Umroh
dan Hadiah lainnya

nusantaramelonfest@gmail.com @nusantaramelonfest Nusantara Melon Fest

Jagung SPHP, Nafas bagi Peternak Unggas Mandiri



Setelah beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), pemerintah resmi meluncurkan program SPHP Jagung Tahun 2025. Langkah ini menjaga stabilitas harga dan ketersediaan jagung pakan bagi peternak ayam mandiri.

Peternak ayam kini bisa bernafas lega. Jika sebelumnya peternak ayam mandiri kerap mengeluhkan naiknya harga bahan baku pakan ternak, khususnya jagung, maka kini pemerintah menjamin ketersediaannya.

Pemerintah menegaskan komitmen menjaga harga jagung di tingkat petani. Harga minimal Rp5.500/kg untuk kadar air 18–20% dan Rp6.400/kg untuk kadar air 14% ditetapkan sesuai Keputusan Kepala Bapanas No. 216 Tahun 2025. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).

Sementara surat Kepala Bapanas No. 262/TS.02.02/K/9/2025 tanggal 23 September 2025, Bulog mendapat mandat untuk melaksanakan program tersebut. Melalui Program SPHP ini, pemerintah akan menyalurkan sebanyak 52.400 ton jagung SPHP kepada 2.109 peternak ayam ras petelur mandiri yang terdaftar dalam berbagai asosiasi dan koperasi. Harganya Rp5.500/kg di tingkat peternak.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menegaskan, SPHP Jagung merupakan bentuk nyata intervensi pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan petani dan peternak, khususnya saat harga jagung melonjak di pasaran. "Saya hanya ingin memastikan 52.400 ton jagung ini bisa segera sampai ke peternak dengan harga Rp5.500. Saat harga tinggi, tugas pemerintah adalah hadir dan membantu," ujar Arief.

Penyaluran SPHP Jagung ini nantinya menggunakan stok Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) yang dikelola BULOG. SPHP Jagung 2025 menyasar kepada 2.109 peternak mandiri yang terdiri dari 192 peternak mikro, 1.693 peternak kecil, dan 224 peternak menengah.

Lokasinya tersebar di 16 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Banten, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, NTB, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

Penerima program SPHP Jagung tahun 2025 telah melalui verifikasi bersama antara Bapanas dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian serta Perum BULOG.

Karena itu, Arief menekankan pentingnya sinergi dan transparansi dalam pelaksanaan program ini. Menurutnya, distribusi akan dilakukan dengan skema *by name, by address* untuk menghindari penyelewengan. Bulog juga diminta menjaga kualitas jagung yang disalurkan, karena akan langsung memengaruhi produktivitas peternakan.

"Jagung ready stock dan siap didistribusikan, dengan anggaran Rp78 miliar dari Bapanas. Peternak mandiri dan peternak rakyat menjadi prioritas utama sampai akhir tahun," tegasnya.

Efek Langsung ke Peternak

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menyambut baik peluncuran SPHP Jagung. Menurutnya, kebijakan ini akan memberikan efek langsung terhadap stabilitas harga pakan, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat.

"Program ini sangat ditunggu-tunggu. Ketika harga jagung naik, SPHP hadir sebagai penyeimbang. Langkah ini akan cepat memengaruhi psikologi pasar, dan kami optimistis harga segera stabil," ujar Agung.

Ia menambahkan, validasi data peternak terus dilakukan agar penyaluran tepat sasaran dan lebih cepat. Selain itu, kualitas jagung akan dijaga agar memberikan dampak maksimal terhadap hasil produksi ternak, khususnya telur dan ayam hidup.

Sementara itu, Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pihaknya siap sepenuhnya menjalankan amanah pemerintah. "Kami siap melaksanakan penyaluran SPHP Jagung 2025 melalui koperasi dan asosiasi yang ditetapkan, dengan stok jagung sebesar 71 ribu ton yang kami miliki. Kami berkomitmen memastikan program ini berjalan tepat sasaran, tertib administrasi, serta memberikan manfaat nyata bagi peternak maupun petani," tutur Rizal.

Menurutnya, kebijakan harga Rp5.500/kg ini dirancang dengan skema yang menguntungkan kedua belah pihak. Petani tetap menerima harga yang baik (lebih tinggi dibanding harga sebelumnya Rp3.150–Rp4.500). Sementara peternak bisa memperoleh jagung dengan harga terjangkau karena biaya distribusi dan pengolahan ditanggung pemerintah.

Melalui skema ini, pemerintah bersama Bulog menutup rantai distribusi dengan konsep "closed loop". Petani menjual hasil panen, Bulog sebagai offtaker menjaga pasokan, peternak mendapat pakan dengan harga terjangkau, dan konsumen diharapkan menikmati pangan dengan harga wajar.

Dengan ketersediaan CJP yang dikelola BULOG sekitar 71 ribu ton, yang mana 52.400 ton dilepas untuk SPHP tahun ini, Pemerintah optimis stabilisasi harga pakan akan tercapai, produktivitas peternak meningkat, dan masyarakat mendapat manfaat langsung berupa ketersediaan telur serta daging ayam yang berkualitas dengan harga terjangkau.

Suwardi, perwakilan peternak ayam layer dari Jawa Tengah menyebut program ini datang di saat yang sangat dibutuhkan. Bahkan, kebijakan ini hadir di saat yang tepat. Saat suplai berkurang dan harga jagung naik, kedatangan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) bisa bantu stabilkan pasar.

"Ini bukan mematikan petani, tapi justru menyeimbangkan kepentingan petani dan peternak," ujarnya. Bahkan Suwardi menganggap, petani dan peternak merupakan satu kesatuan yang saling bergantung. "Kedatangan cadangan jagung pemerintah ini sangat tepat waktu. Dengan harga Rp5.500 yang sudah diterima petani, kini peternak juga bisa bernafas lega. Antara petani dan peternak sama-sama dilindungi." **Yul**



Uniknya Ikan Bandeng, Tulangnya Bisa Ditarik



Bagi banyak orang, makan ikan kerap identik dengan kerepotan memisahkan tulang dari daging. Namun, ikan bandeng (Chanos chanos) hadir sebagai pengecualian. tulangnya justru bisa ditarik dengan mudah. Apa alasan ilmiah di balik fenomena itu?

Ikan bandeng menjadi salah satu jenis ikan yang banyak disukai masyarakat. Rasa ikan bandeng yang gurih dan memiliki tekstur lembut menjadikannya ikan yang popular diolah di Indonesia.

Namun salah satu kendala mengonsumsi ikan ini, karena memiliki duri yang banyak sehingga perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut sebelum dimakan ataupun lebih berhati hati saat mengonsumsi ikan bandeng. Olahan makanan ikan bandeng yang terkenal seperti bandeng asap, sate bandeng, bandeng presto, dan sebagainya.

Tapi menurut Prof Joko Santoso, Guru Besar IPB University dari Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, tulang bandeng bisa ditarik. Menurutnya, kemudahan menarik tulang bandeng bukan-lah kebetulan. Ikan bandeng betina yang dapat ditarik tulangnya karena kombinasi anatomi rangka dan teknik *deboning* (*butterfly* plus tarik) yang memanfaatkan sambungan tulang-otot.

"Hasilnya, kerangka bisa dikeluar-kan relatif utuh saat diproses," ujarnya seperti dikutip dari laman IPB University. Namun ia menambahkan, tidak semua ikan bisa diperlakukan serupa layaknya bandeng, karena sangat bergantung pada jenis ikan.

Menurutnya, banyak ikan punya *intermuscular bones* yang menyulitkan *deboning* sempurna. Hanya beberapa spesies dengan susunan tulang tertentu yang memungkinkan metode mekanis seperti pada bandeng.

Selain soal tulang, Prof Joko juga menyinggung perilaku bandeng kerap disebut "sulit dipancing." Menurutnya, fenomena itu kemungkinan besar dipengaruhi fase reproduksi, ukuran dan tingkah laku, atau perubahan habitat saat musim pemijahan.

"Klaim ini didukung oleh studi hormon dan pematangan, meski tidak ada bukti tunggal yang mutlak. Perilaku semacam ini juga terlihat pada spesies ikan lain selama siklus reproduksi," jelasnya.

Lebih jauh, bandeng ternyata bukan hanya unik dari sisi anatomi, tetapi juga unggul dari segi gizi. Prof Joko memaparkan, bandeng kaya protein, asam lemak tak jenuh, serta empat mineral penting (kalsium, magnesium, zat besi, dan seng), ditambah vitamin B12. "Keistimewaannya adalah kombinasi nilai gizi daging dan potensi pemanfaatan tulang serta sisik untuk produk kalsium dan kolagen," ujarnya. **Yul**

Komersialisasi E-PAPER Sinartani

Tabloid Sinartani | Tabloid sinartani.com | SINTA TV

E-paper Sinartani sudah berjalan selama 2 tahun dan memberikan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan Sinartani versi cetak. E-paper Sinartani terbit tiap minggu, 48 kali setahun, terdiri dari 20-24 halaman sekali terbit. Informasinya mencakup issue-issue yang lebih melebar, selain pertanian juga mencakup informasi umum dan humaniora.

Sampai saat ini e-Paper Sinartani masih didistribusikan secara gratis ke semua penyuluh. Kini, waktunya E-Paper yang sudah dikenal oleh penyuluh dan petani itu mulai dijual secara komersil dengan harga yang teramat murah, yaitu Rp 1.500/edisi atau Rp 72.000/tahun.

Mudah-mudahan upaya ini merupakan sinergi yang baik antara pembaca dengan penerbit Sinartani yang tidak henti-hentinya berupaya meningkatkan kualitas Sinartani agar lebih bermanfaat dan sekaligus memberi bahan bacaan yang baik bagi pembacanya.

Para pembaca yang ingin berlangganan dipersilahkan mengirimkan nama dan nomor HP-nya, melalui WhatsApp ke Sdr Wawan (081216304232) serta mentransfer biaya tahunan sebesar Rp 72.000 ke Rekening Sinartani: Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413



BERLANGGANAN
E-paper Tabloid Sinartani

Hanya dengan
Rp. 72.000 / Tahun

HUBUNGI :
0813 1757 5066
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut

KAMI MENJANGKAU LEBIH LUAS

www.tabloidsinartani.com | tabloidsinartani.com | tabloidsinartani.com | @SinarTaniST | tabloidsinartani | SINTA TV

Bulog Tawarkan Aset Eks Goro ke Swasta

Perum Bulog menawarkan aset yang idle kepada swasta. Aset tersebut ada yang berupa bangunan maupun lahan kosong. Salah satunya aset Bulog eks Goro di Kelapa Gading, Jakarta Utara.



"Bulog itu ternyata asetnya luar biasa. Nah ini merupakan suatu peluang yang besar apabila kita bisa kelola dengan baik," kata Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani saat meluncurkan Beloft (Bulog Business District) di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (2/10).

Diperkirakan aset Bulog yang saat ini belum termanfaatkan optimal di seluruh Indonesia nilainya mencapai Rp 53 triliun. "Sayang kalau aset-aset kita ini tidak diberdayakan, namun pemberdayaan aset ini semua kembali untuk keuntungan bangsa. Sebab dalam memanfaatkan aset negara ada aturannya," katanya.

Karena itu Rizal berharap kepada staf Bulog yang bertugas menangani aset tersebut untuk menjadikan Beloft menjadi ikon kawasan bisnis milik Bulog. "Jadi ke depan masyarakat mengetahui bahwa Beloft adalah ikon kawasan bisnis Bulog," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Rizal, pihaknya membuka ruang kepada pengusaha di seluruh tanah air untuk memanfaatkan dan mengembangkan kawasan dan aset Bulog.

" Silahkan nanti teman-teman pengusaha dari seluruh tanah air bisa bersinergi dengan Bulog untuk mengembangkan aset-aset tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan pemerintah, khususnya dari Kementerian Keuangan," ujarnya.

Rizal juga mengingatkan agar dalam memanfaatkan aset Bulog yang ideal tersebut tidak menyalahi prosedur-prosedur hukum yang berlaku. Pada kesempatan itu, Rizal juga mohon kepada pemerintah daerah seperti camat, Danramil dan Kapolsek membantu mensosialisasikan juga kepada warga.

"Mungkin banyak teman-teman pengusaha yang mau buka usaha di sini, boleh silakan. Ataupun ada masyarakat yang mau ada acara kuliner makan-makan di sini juga banyak," katanya.

Rizal juga berharap dukungan Kapolsek dan Danramil sambil sosialisasi, juga membantu untuk menjaga. Sebab di sini juga merupakan objek vital nasional, karena ada pergudangan beras yang terbesar di seluruh tanah air.

Sementara itu, Direktur Bisnis Perum Bulog, Feby Novita menambahkan, aset Bulog yang belum terpakai cukup banyak. Misalnya untuk di kawasan bisnis Bulog (Beloft) Kelapa Gading ada sekitar 4,19 ha lahan dengan luas bangunan sekitar 2 ha. Lahan tersebut kini sudah ada yang disewa untuk bursa mobil, gudang market place dan rumah makan. "Kita lihat bagaimana aset Bulog begitu banyak," ujarnya.

Feby mengakui, pengembangan aset Bulog menjadi kawasan bisnis bisa menambah pendapatan Bulog. Untuk di kawasan bisnis Beloft Kelapa Gading dalam setahun ini nilainya mencapai Rp 34 miliar. "Ke depan kita ingin kawasan bisnis ini menjadi pusat kuliner. Bahkan menjadi tempat hangout yang instagramable," katanya.

Saat ini ada sekitar 5.000 meter lahan yang belum tersewa. Beberapa lokasi sudah ada kerjasama untuk membangun lapangan Fadel dan Driving Park. Bukan hanya di Kelapa Gading, Feby juga berharap aset Bulog di daerah yang idle juga dikembangkan menjadi kawasan bisnis juga.

Karena itu, ia berharap staf karyawan Bulog yang ada di daerah menjadi marketing untuk menawarkan aset Bulog. "Jadi itunya Bulog harus bertransformasi. Kita juga harus bisa membranding kawasan bisnis Bulog ini," ujarnya.

Yul

Incar Permintaan Tahun Baru, Warga Jaktim Tanam Jagung

Pergantian tahun biasanya disambut warga dengan berbagai kegiatan kebersamaan antar warga. Seperti di Ibukota Negara, DKI Jakarta, banyak warga yang menyambut tahun baru dengan bakar jagung.

Kegiatan tersebut berdampak pada meningkatnya permintaan jagung konsumsi. Incar pasar tersebut, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur (Sudin KPKP Jakarta Timur) mengajak warga untuk menanam jagung serentak di 181 titik lokasi se-Jakarta Timur pada Jumat (3/10).

Kegiatan ini berada di Kelompok Tani Lahan Aset Kalisari, Jl. Guruh Serih I, Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur serta dilaksanakan secara hybrid. Fauzi, Asisten Perekonomian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur berharap penanaman jagung saat ini dapat memenuhi kebutuhan warga Jakarta dan sekitarnya, khususnya menjelang malam pergantian tahun 2025 ke 2026.

Hitungannya jika umur pertanaman jagung rata-rata 70 hari, maka dengan menanam sekarang akan panen pada Desember mendatang. Selain itu, kegiatan menanam ini juga dimaksudkan untuk mendukung swasembada pangan secara luas.

"Warga Jakarta mempunyai kebiasaan membakar jagung saat malam pergantian tahun. Hal ini menjadi potensi pendapatan ekonomi, masyarakat tidak perlu jauh-jauh membeli jagung, cukup di kelompok tani terdekat," katanya.

Fauzi berpesan agar tanaman jagung dijaga sebaik-nya, pemeliharaan dilakukan dengan baik agar berhasil panen dan membawa keberkahan untuk semua. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur memfasilitasi adanya kegiatan "Pasar Tumbuh" setiap bulan. Pada Agustus lalu, omset dari Pasar Tumbuh mencapai Rp 30 juta.



Taufik Yulianto, Kepala Sudin KPKP Jakarta Timur mengatakan, total peserta tanam serentak sebanyak 181 lokasi dengan luasan kurang lebih 2,19 Ha di 10 Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur. Di Kecamatan Cakung (27 lokasi), Kecamatan Duren Sawit (26 Lokasi), Kecamatan Cipayung (23 lokasi), Kecamatan Pulogadung (22 lokasi), Kecamatan Ciracas (18 lokasi), Kecamatan Makasar (17 lokasi), Kecamatan Matraman (14 Lokasi), Kecamatan Kramat Jati (14 lokasi), Kecamatan Jatinegara (12 lokasi), dan Kecamatan Pasar Rebo (8 lokasi).

Indri/Yul


Selamat & Sukses
atas
Pengukuhan Pengurus Harian DPN HKTI
Periode 2025 - 2030
Jumat, 3 Oktober 2025
HKTI
HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA
Sinartani
SINARTANI.COM
SINTA TV
tabloidsinartani.com
tabloidsinartani.com
@sinarTaniST
tabloidsinartani
SINTA TV
SINTA TV